

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**DAMPAK PROGRAM BANTUAN SARANA PENGOLAHAN
HASIL PERIKANAN PADA KELOMPOK SASARAN
DI KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

H A N I A H

NIM. 500647365

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRACT

THE IMPACT OF PROCESSING FACILITIES ASSISTANCE PROGRAM IN FISHERY PRODUCTS TARGET GROUPS IN NUNUKAN DISTRICT

Haniah

haniahdkp@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study aims to analyze the impact of aided fishery product processing facilities in a target groups in Nunukan and formulate the cause of notrealizing the target groups production targets set by the local government. This study is a qualitative research that describes in a factual manner the object of the study and describes the impact of aided fishery product processing facilities in the target group with criteria forming the target group program effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of the program. The sources of this study are Head of the Department of Marine and Fisheries and the Fishery Products Processing Section Head at the DKP Nunukan, and the target groups targeted assistance program processing of fishery products in Nunukan. The instruments used in this study were the observation and interview guide lines. Data was analyzed using the Miles and Huberman analysis. The results of this study indicate that for the criteria effectiveness show production and value of production of target group program experienced a significant increase after the implementation of the facilities assistance program processing of fishery products. In terms of efficiency, that is the efforts attempts of the output the target groups in production and revenues that can be seen from the managerial group working less than it maximum. For the adequacy criteria, shows that the Government's target is too high when compared with production output of the target group. In terms of even distribution the program indicates that the balance has not occurred yet or can be said to be a fair facilities assistance program in processing fishery products because out of 100% of fishery product processing businesses in Nunukan only 24% became part of the program. In terms of responsiveness or the response of the target group it showed a positive response to the fish processing facilities assistance by DKP Nunukan. Then, in terms of the accuracy of the program it indicated the program's success in increasing the production and value of production of the target group.

Keywords: Impact, Goal Assistance program Fishery Processing, Target Group, Local Government Target.

ABSTRAK

DAMPAK PROGRAM BANTUAN SARANA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PADA KELOMPOK SASARAN DI KABUPATEN NUNUKAN

Haniah

haniahdkp@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bantuan sarana pengolahan hasil perikanan pada kelompok sasaran di Kabupaten Nunukan serta merumuskan penyebab tidak terealisasinya target produksi kelompok sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan secara faktual objek penelitian dan mendeskripsikan dampak bantuan sarana pengolahan hasil perikanan pada kelompok sasaran dengan kriteria berupa efektifitas kelompok sasaran program, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan program. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan pada DKP Kabupaten Nunukan, serta kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kriteria efektifitas menunjukkan produksi dan nilai produksi kelompok sasaran program mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah diimplementasikannya program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan. Dari segi efisiensi, yaitu upaya kelompok sasaran dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya yang dapat dilihat dari manajerial kelompok kurang berjalan maksimal. Untuk kriteria kecukupan menunjukkan hasil bahwa target Pemerintah Daerah terlalu tinggi bila dibandingkan dengan hasil produksi kelompok sasaran program. Dari segi pemerataan program menunjukkan hasil bahwa belum terjadi keseimbangan atau belum dapat dikatakan adil program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan tersebut karena dari 100% pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan baru 24% yang menjadi sasaran program tersebut. Dari segi responsivitas atau tanggapan kelompok sasaran program menunjukkan tanggapan yang positif terhadap bantuan sarana pengolahan hasil perikanan oleh DKP Kabupaten Nunukan. Dan dari segi ketepatan program menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan produksi dan nilai produksi kelompok sasaran.

Kata Kunci: Dampak, Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan, Kelompok Sasaran, Target Pemerintah Daerah.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Dampak Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan pada Kelompok Sasaran di Kabupaten Nunukan** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, 23 Oktober 2016

Yang Menyatakan



(HANIAH)

NIM. 500647365

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERSETUJUAN TAPM


Judul TAPM : Dampak Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil perikanan Pada Kelompok Sasaran di Kabupaten Nunukan


Penyusun TAPM : HANIAH
NIM : 500647365
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Minggu/ 23 Oktober 2016

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,


Dr. R. Benny Agus Pribadi, M.A
NIP. 19610509 198703 1 001

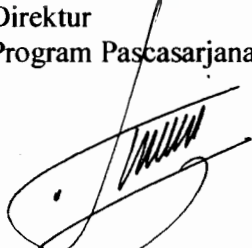

Dr. Samodra Wibawa, M.Sc
NIP. 19650827 199103 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik

Direktur
Program Pascasarjana


Dr. DARMANTO, M.Ed
NIP. 19591027 198703 1 003


SUCIATI, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : HANIAH
 NIM : 500647365
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Dampak Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan
 pada Kelompok Sasaran di Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu/23 Oktober 2016
 Waktu : 11.00 – 12.30 Wita

Dan telah dinyatakan : Lulus

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Dr.Sofjan Aripin, M.Si

Tanda Tangan

Penguji Ahli
 Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si

Pembimbing I
 Dr. Samodra Wibawa, M.Sc

Pembimbing II
 Dr. R.Benny Agus Pribadi, M.A

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan TAPM ini hingga penyelesaiannya banyak menemui kendala berupa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan, namun karena bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan TAPM ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis memberikan penghargaan terhadap masukan penyempurnaan hasil penulisan TAPM ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka, Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka dan Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Samarinda dan Pokjar Nunukan yang telah memberikan dukungan dan fasilitas pembelajaran;
3. Bapak Dr. Samodra Wibawa, M.Sc selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan semangat;

4. Bapak Dr.R.Benny Agus Pribadi, M.A., selaku Pembimbing II atas segala masukan dan pengarahan dalam penyusunan TAPM ini;
5. Ibu Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si selaku penguji ahli yang telah memberikan saran dan masukan;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan beserta jajarannya;
7. Saudara-saudara, keponakan dan seluruh rekan kerja yang telah memberikan dukungan moril selama masa studi saya dalam membantu menyelesaikan penulisan TAPM ini.
8. Para Informan yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini serta Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Terbuka Program Magister Administrasi Publik Nunukan Satu Angkatan terkhususkan yang satu pembimbing dalam penulisan TAPM atas kebersamaan, bantuan dan kerjasamanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis hanya bisa berdoa kepada Allah SWT kiranya berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan semua pihak yang membutuhkan.

Nunukan, 23 Oktober 2016

Penulis,




Haniah

RIWAYAT HIDUP

- Nama : HANIAH
- NIM : 500647365
- Program Studi : Magister Administrasi Publik
- Tempat / Tanggal Lahir : Bone / 5 September 1969
- Riwayat Pendidikan : - Lulus SD di SD Inpres 73 Tellu Boccoe Kec, Mare Kabl Bone Prov. Sul-Sel pada tahun 1983
- Lulus SMP di SMPN Mara Kab. Bone Prov. Sul-Sel pada Tahun 1986
- Lulus SMA di SMAN Mara Kab. Bone Prov. Sul-Sel pada Tahun 1989
- Lulus SI di Fakultas Perikanan Jurusan Budidaya Perairan Universitas Muslim Indonesua (UMI) – Makassar pada Tahun 1998
- Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2008 s/d 2009 sebagai CPNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan
- Tahun 2009 s/d 2011 Sebagai PNS Staf Bagian Keungan dan Penyusunan Program dan Pelaporan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan
- Tahun 2011 s/d 2015 sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan
- Tahun 2015 s/d Sekarang sebagai Kepala Seksi Teknologi Penangkapan Ikan dan SDI di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan

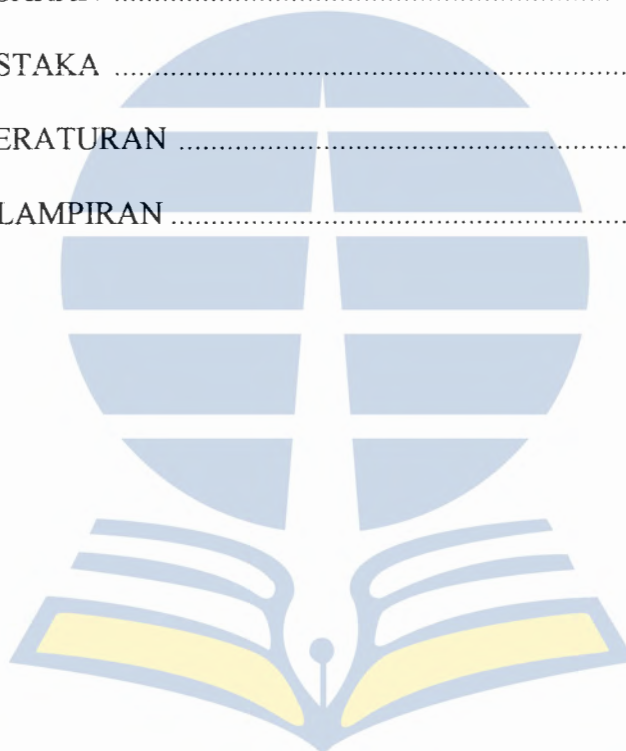
Nunukan, 23 Oktober 2016


HANIAH
 NIM. 500647365

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Bagan	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	13
1. Konteks Kesejahteraan Masyarakat dengan berbagai Permasalahan	13
2. Kebijakan Publik dalam bentuk Program Bantuan Kepada Masyarakat	20
3. Evaluasi Kebijakan Publik	23
4. Dampak Kebijakan Publik	27
5. Peningkatan Produktivitas Pelaku Usaha Pengolah Hasil Perikanan	35
C. Kerangka Berpikir	42
D. Operasionalisasi Konsep	42
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	45
B. Informan Penelitian	46
C. Instrumen Penelitian	47
D. Prosedur Pengumpulan Data	48
E. Metode Analisis Data	49
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	53
1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan	53

2. Bantuan sarana Pengolahan Hasil Perikanan Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan..	56
B. Hasil dan Pembahasan	63
Dampak Program Bantuan	
1. Efektifitas	64
2. Efisiensi	79
3. Kecukupan	82
4. Perataan	86
5. Responsivitas	88
6. Ketepatan	90
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	96
RUJUKAN PERATURAN	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap, Budiadaya, Pengolahan Hasil Perikanan	7
Tabel 1.2.	Target Produksi Hasil Pengolahan Hasil Perikanan	9
Tabel 4.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2010 – 2014 Menurut Kecamatan (jiwa)	55
Tabel 4.2.	Persentase Penduduk Kabupaten Nunukan Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama 2010 – 2014 (%)	56
Tabel 4.3.	Data Pelaku Utama Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan.....	59
Tabel 4.4.	Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan	62
Tabel 4.5.	Tabel Target dan Realisasi Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	65
Tabel 4.6.	Tabel Realisasi Produksi Kelompok Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan	67
Tabel 4.7.	Jenis-jenis Produk Olahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan	69
Tabel 4.8.	Nilai Produksi POKLAHSAR Sasaran Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan.....	71
Tabel 4.9.	Data Pelaku Utama Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan	74
Tabel 4.10.	Tabel Perbedaan Jumlah Pelaku Usaha Perorangan dengan Kelompok.....	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pemahaman Dasar Proses Kebijakan.....	24
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	42
Gambar 3.1 Proses Analisis Interaktif Miles dan Huberman	50
Gambar 4.1 Peta wilayah Kabupaten Nunukan.....	54
Gambar 4.2 Diagram Fluktuasi Volume Produksi Per Tahun.....	68
Gambar 4.3 Diagram Fluktuasi Nilai Prndapatan Kelompok Sasaran Program per Tahun.....	72



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 3.1 Diagram alur penelitian	45



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Observasi.....	99
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	100



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik merupakan proses negara dalam mengatasi permasalahan publik melalui kebijakan publik. Permasalahan publik tidak pernah berhenti dalam proses bernegara, baik masyarakat yang paling sederhana maupun yang modern hampir dapat dipastikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah bersama atau masalah publik yang menuntut pemecahan bersama melalui serangkaian tindakan yang terorganisasi. Dalam mengatasi permasalahan publik dibutuhkan kebijakan publik sebagai instrumen bagi administrator publik dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah. Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil sebagai administrator negara merupakan pelaku utama dalam administrasi publik. Pemerintah merupakan salah satu elemen negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan, merealisasikan, keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi delapan fungsi pemerintah yaitu : a). *Devense*; b). *Law and order*; c). *Taxation*; d) *Provision of welfare service*; e) *Protection of individuals*; f) *Regulating the economic*; g) *Provision of certain economic service and*; h) *Development of human and phisycal resources*. Melalui fungsi-fungsi pemerintah tersebut kemudian disalurkan lewat kebijakan publik dan program-program pemerintah yang kesemuanya termasuk kedalam tugas administrasi publik.

Permasalahan masyarakat secara nasional khususnya diwilayah pesisir tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan. Dampak kemiskinan ini merambah pada keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas-

fasilitas ekonomi dan sosial. Kemiskinan terjadi bukan hanya karena faktor terbatasnya lapangan pekerjaan, akan tetapi walaupun dengan pekerjaan yang ada masyarakat tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum keluarga akibat pendapatan yang rendah. Kemiskinan merupakan permasalahan publik yang wajib ditangani oleh negara. Oleh karena itu beberapa kebijakan publik dirumuskan khusus untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Beberapa kebijakan pemerintah yang dikhususkan bagi pengentasan kemiskinan diantaranya adalah :

1. Kebijakan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas dimana dalam tataran implementasinya, kebijakan ini banyak menuai pro dan kontra dalam masyarakat.
2. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, dimana program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.
3. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, dimana fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin.

Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini adalah :

- a. Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
- b. Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
- c. Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro.
- d. Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal.

- e. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro.
 - f. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
 - g. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil.
 - h. Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga (PKK).
 - i. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah.
 - j. Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
4. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus kegiatan ini antara lain :
- a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan.
 - b. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.
 - c. Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus.
 - d. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
5. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
- a. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).

- b. Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).
 - c. Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi.
 - d. Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.
6. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :
- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA).
 - b. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
 - c. Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
 - d. Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
 - e. Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).
7. Membangun Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia merupakan kebijakan yang salah satu tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada pengentasan kemiskinan. Otonomi Daerah merupakan pemberian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk secara mandiri membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Latar

belakang diterapkannya otonomi daerah adalah krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang telah merusak sendi-sendi ekonomi dan politik negeri yang sudah cukup lama merdeka ini. Krisis tersebut terjadi salah satunya disebabkan sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, dimana kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerah. Sebagai respon dari krisis tersebut, maka pada masa reformasi dicanangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting, yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antarpusat dan daerah. Asumsi otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada organisasi pemerintahan daerah karena daerah yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan aktual dari masyarakatnya, serta tidak mungkin pemerintah pusat mampu melayani dan mengurus kepentingan dan urusan masyarakat yang demikian kompleks hingga keseluruhan pelosok Indonesia. Dengan adanya mekanisme dana perimbangan antara pusat dan daerah, membuat daerah lebih leluasa menyusun rencana strategisnya yang mengarah pada optimalisasi pengelolaan sumber daya demi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu sumberdaya alam potensial yang dapat menunjang perekonomian masyarakat adalah sumberdaya perikanan. Begitupun halnya dengan Kabupaten Nunukan, sebagai wilayah pesisir paling utara dari Pulau Kalimantan, Kabupaten Nunukan memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Dengan luas wilayah 14.263,68 km², Kabupaten Nunukan memiliki garis pantai sepanjang 314.592 Km² dan luas perairan 304.867 Ha yang menyimpan beraneka ragam jenis ikan dan biota perairan lainnya yang memiliki nilai

ekonomis tinggi. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun rencana strategis pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikatornya berupa peningkatan produksi, baik produksi dibidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan. Melalui indikator peningkatan produksi dapat terlihat berhasil atau tidaknya program-program pemerintah yang telah diimplementasikan kepada masyarakat.

Salah satu kegiatan dibidang perikanan yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat adalah kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan. Di Kabupaten Nunukan, kegiatan Pengolahan hasil perikanan cukup berkembang apabila dibandingkan 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Jenis pengolahan yang dilakukan yaitu pengolahan pengeringan, pengolahan segar, pengasapan, surimi, dan pengolahan lainnya. Akan tetapi apabila dibandingkan antara produksi dibidang perikanan tangkap dan produksi dibidang perikanan budidaya dengan produksi pengolahan hasil perikanan terdapat perbedaan yang sangat jauh, padahal hasil dari produksi perikanan tangkap dan budidaya merupakan bahan baku produksi pengolahan hasil perikanan. Ini menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap dan budidaya masih banyak yang dijual dalam bentuk *raw material* atau bahan baku sehingga hanya sedikit memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat pelaku utama. Seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut menggambarkan perkembangan produksi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Nunukan selama kurun waktu 5 tahun sejak 2011 – 2015.

Tabel 1.1 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan

No.	Kegiatan	Perkembangan Produksi (Ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Perikanan Tangkap	4.178,15	4.267,61	4.329,30	4.385,09	4.438,7
2	Perikanan Budidaya	120.022,30	150.314,63	208.824,97	251.142,29	272.835,19
3	Pengolahan	8.149,28	12.838,07	15.534,02	36.347,92	25.916,3

Sumber: Statistik Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan

Produksi perikanan tangkap cenderung mengalami peningkatan antara 1% - 2%. Hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Nunukan lebih banyak didominasi ikan-ikan ekonomis tinggi seperti Kakap, Bembang, Kerapu, Kuro, Senangin, Tongkol, Cakalang, Kepiting, dan lain-lain. Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan 9% sampai dengan 39%, hal ini disebabkan peningkatan produksi Rumput Laut yang secara signifikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bila dikalkulasikan antara produksi perikanan tangkap dengan produksi perikanan budidaya, hanya sekitar 9% yang diolah termasuk rumput laut, sedangkan sisanya dijual dalam bentuk bahan baku. Kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan produksi disektor pengolahan hasil perikanan telah diimplementasikan salah satunya melalui Program Bantuan Sarana dan Prasarana pengolahan hasil perikanan. Sejak Nunukan dimekarkan dari Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Bulungan tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Nunukan baru terbentuk pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001. Sejak Diskanla Kabupaten Nunukan berdiri pada tahun 2001 hingga tahun 2007, belum ada bidang khusus yang menangani pengolahan hasil perikanan. Baru pada tahun 2008 sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan ada tugas dan fungsi (tupoksi) khusus Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sejak saat itu, kebijakan pemerintah dalam bentuk program-program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pengolahan hasil perikanan mulai di implementasikan, salah satu program tersebut adalah program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan item-item kegiatan yaitu kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kegiatan promosi hasil perikanan, kegiatan sosialisasi dan pembinaan mutu, serta kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat pengolah hasil perikanan.

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran sesuai rencana strategis DKP Kabupaten Nunukan maka ditentukanlah indikator dan target kinerja yang harus dicapai. Pada bidang pengolahan hasil perikanan, pada awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012, indikator kinerja utama khusus peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan yang ditargetkan untuk 5 (lima) tahun yakni sebesar 32.807 Ton, dari total target produksi tersebut diharapkan sebesar 4.956 Ton bisa diperoleh dari

produksi kelompok binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan yang dalam hal ini merupakan kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan. Lebih jelasnya untuk target dan realisasi produksi pengolahan hasil perikanan Kabupaten Nunukan pertahun dapat dilihat pada tabel 1.2. Target produksi pengolahan hasil perikanan tersebut dapat direalisasikan melalui program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Tabel 1.2 Tabel Target dan Realisasi Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Tahun	Target (Ton)		Realisasi (Ton)	
	Perorangan	Kelompok	Perorangan	Kelompok
2011	3.797	189,85	8.149,18	18,85
2012	3.979	948,9	12.838,07	20,72
2013	4.161	1.111	15.534,00	310,7
2014	4.344	1.272	36.347,92	312,02
2015	4.526	1.434	25.916,30	134,55

Sumber : RPJMD dan LAKIP DKP Kab. Nunukan Tahun 2008 – 2013 (Diolah)

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi produksi pengolahan hasil perikanan untuk kategori perorangan melebihi target disebabkan kontribusi hasil produksi Rumput Laut kering yang hampir mendominasi total produksi yaitu hampir 90%, sedangkan produk olahan ikan lainnya khususnya produk olahan konsumsi hanya sekitar 10% dari total produksi olahan perorangan. Untuk realisasi produk olahan hasil perikanan kelompok pengolah atau yang disebut juga Poklahsar (kelompok Pengolah dan Pemasar) terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara target dengan realisasi. Realisasi produksi Poklahsar sangat rendah bila dibandingkan dengan target produksi yang telah ditetapkan, padahal pada tahun tersebut program pemerintah dalam bentuk bantuan sarana dan

prasarana perikanan telah beberapa tahun berjalan. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DKP Kabupaten Nunukan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Oleh karena itu, sangat *urgent* dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan tersebut untuk menemukan kendala apa yang dialami masyarakat atau sasaran program hingga menyebabkan target produksi yang diharapkan tidak tercapai. Evaluasi program dapat terlihat dari dampak program/kegiatan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dampak program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan khususnya pada Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan Dampak Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Pada Kelompok Sasaran di Kabupaten Nunukan, maka masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah “Apa dampak Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah untuk :

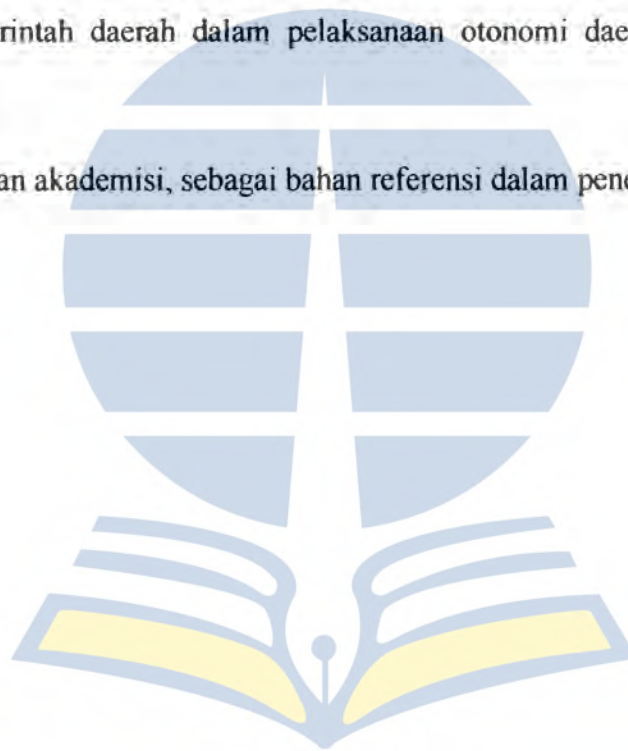
1. Menganalisis dampak bantuan sarana pengolahan hasil perikanan pada kelompok sasaran.

2. Merumuskan penyebab tidak terealisasinya target produksi kelompok sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Atas hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bahan untuk evaluasi kebijakan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kabupaten Nunukan, dan merupakan sumbangan pemikiran bagi unsur pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nunukan.
2. Bagi kalangan akademisi, sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Beberapa Penelitian terdahulu tentang dampak program/kebijakan publik yang menjadi pembanding dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Chandra (2010) dan Habibillah (2010) melakukan pendekatan evaluasi dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan evaluasi kualitatif yakni mengukur penilaian baik, sedang, dan buruk dari suatu program dengan menitikberatkan pada proses pelaksanaan program mulai dari *input*, proses, *output*, *outcome*, dan *benefit*.
2. Santosa, Hidayat dan Indroyono (2003) pendekatan penelitian evaluasi dampak yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode ESCAP (*Economic and Social Commission for Asian and Pacific*) yakni dengan menilai beberapa indikator seperti peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, efisiensi penyaluran program dan kelangsungan program.
3. Triane Widya Anggriani (2012), Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode adalah metode statistik deskriptif dengan pendekatan evaluasi dampak (*impact evaluation*). Yaitu menghitung perubahan tingkat pendapatan penerima bantuan dana Program PUAP pada tahun 2009 (Kelompok Aksi) sebelum intervensi program (*baseline*) dan setelah adanya intervensi, yaitu tahun 2012 (*impact*). Untuk mengetahui bahwa dampak yang ada ditimbulkan dari kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Program PUAP dilakukan proses *netting out* dengan membentuk kelompok kontrol yaitu rumah tangga dengan karakteristik kemiskinan yang sama namun tidak mendapat intervensi program. Sama halnya dengan kelompok aksi, pada kelompok kontrol juga dilakukan perhitungan perubahan tingkat pendapatan sebelum dan setelah intervensi program. Kemudian perubahan pendapatan pada kelompok aksi dibandingkan dengan kelompok kontrol sehingga diperoleh besar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan BLM Program PUAP.

4. Reski (2013), Dampak Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu metode yang menjelaskan atau mendeskripsikan fakta yang ada sebelum dan sesudah adanya kegiatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan terhadap hasil produksi maupun nilai hasil produksi pembudidayaan rumput laut. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa usaha budidaya rumput laut pada tahun penelitian layak untuk diusahakan atau menguntungkan. Berdasarkan perhitungan margin dan efisiensi pemasaran ternyata saluran pemasaran di lokasi penelitian terbukti efisien.

B. Kajian Teori

1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dengan Berbagai Permasalahannya

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera: aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan (*welfare*) adalah kondisi yang

menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan. “Kesejahteraan sosial adalah sistem yang mengatur pelayanan so”sial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat”.

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan Sosial seperti yang termuat di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2009, sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam Undang-undang Kesejahteraan Sosial, kriteria masalah sosial yang perlu diatasi meliputi: 1) kemiskinan; 2) ketelantaran; 3) kecacatan; 4) keterpencilan; 5) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; 6) korban bencana; dan/atau 7) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Intinya, kesejahteraan sosial menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*) dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi: pangan (makanan) sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti: pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil, dan sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, HP,

internet, dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan hiburan. Kategori kebutuhan di atas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materil.

Ada 4 (empat) indikator kesejahteraan sosial menurut Nasikun (1993) dalam Irul (2014) yaitu :

1. Rasa aman (*security*),
2. Kesejahteraan/keselamatan (*welfare*),
3. Kebebasan (*freedom*), dan
4. Jati diri (*identity*)

Indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah menurut Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) seperti yang dikutip dari ulasan konsep kesejahteraan (Irul, 2014) adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Kolle (1974) dalam Bintarto (1989) mengemukakan bahwa untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian, penyesuaian, dan sebagainya.

Todaro (2003) dalam Irul (2014) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya mereka dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989) melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek, yaitu : (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (*somatic status*), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; (2) dengan melihat pada tingkat mentalnya (*mental/educational status*) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosial (*social status*).

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional seperti sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global (Taslim, 2004 dalam Irul, 2014).

Permasalahan kesejahteraan sosial terjadi bilamana semua kriteria-kriteria kesejahteraan tadi tidak terpenuhi atau ada hambatan dalam pemenuhannya. Permasalahan kesejahteraan sosial juga merupakan permasalahan publik. Permasalahan publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat (Winarno, 2014). Permasalahan kesejahteraan yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara, sehingga masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Sebagai bagian dari permasalahan publik maka negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial membuat kebijakan yang secara umum terangkum dalam Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Masih banyak kebijakan publik lainnya yang bermuara pada kesejahteraan sosial akan tetapi sudah membahas sub-sub bidang seperti pertanian, perikanan, kehutanan, energi, termasuk kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah.

Dibidang perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia sebagai leading sektornya juga telah banyak merumuskan kebijakan publik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan. Dibidang perikanan tangkap misalnya, kebijakan pemberian bantuan alat tangkap dan kapal penangkap ikan bagi nelayan merupakan salah satu contoh kebijakan

yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dibidang pengolahan hasil perikanan juga terdapat program bantuan sarana dan prasarana bagi pelaku utama. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah lama mengeluarkan kebijakan dibidang pendidikan yang sangat membantu masyarakat pesisir di Indonesia yang selama ini identik dengan “masyarakat yang termarjinalkan” yaitu program pendidikan gratis setingkat SMU dan D4 (setara S1) jurusan khusus perikanan bagi anak-anak pelaku utama perikanan baik anak-anak nelayan, pembudidaya ikan, maupun pengolah dan pemasar ikan. Untuk sekolah di tingkat menengah umum (SMU) dinamakan SPMU atau Sekolah Perikanan Menengah Umum, sekolah ini terdapat di beberapa daerah di Indonesia seperti di Bone, Pangkep, dan Pontianak. Sementara di tingkat D4 yaitu di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta.

Permasalahan kesejahteraan termuat didalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 – 2021 sebagai salah satu agenda utama yang membutuhkan perhatian khusus. Permasalahan kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa di era perdagangan bebas serta penerapan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Namun, kondisi kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas. Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015, utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha mikro kecil untuk meningkatkan daya saing melalui

sinergi lintas sektor (termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan), perlindungan terhadap pasar domestik, dan sertifikasi produk.

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah. Sebagai negara maritim yang terdiri dari gugusan pulau-pulau (*Archipelagic State*) dimana laut Indonesia lebih luas dari daratan, laut menjadi sangat vital dalam pemerataan pembangunan nasional. Melalui visi misi Presiden, diharapkan laut dapat menghubungkan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, termasuk pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau kecil didalamnya, sekaligus sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan).

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pembantu presiden memiliki mandat khusus untuk melaksanakan pembangunan disektor kelautan dan perikanan Indonesia demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satunya adalah mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Misi kesejahteraan ini memiliki tujuan yakni : (1) mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat; serta (2) mengembangkan inovasi

ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan. Semoga tujuan dari misi KKP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dapat terwujud.

Sejalan dengan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan juga memiliki misi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Misi tersebut memiliki tujuan yaitu (1). Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berwawasan lingkungan; (2). Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana perikanan; serta (3). Meningkatkan kualitas SDM masyarakat perikanan serta penguatan kelembagaan kelompok perikanan.

2. Kebijakan Publik dalam bentuk Program Bantuan Kepada Masyarakat

Telah banyak kebijakan publik yang lahir atas dasar permasalahan kesejahteraan sosial. Pada hakikatnya kebijakan publik dalam bentuk program bantuan kepada masyarakat merupakan kewajiban negara seperti yang termuat didalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara menjamin hajat hidup orang banyak”. Akan tetapi seringkali dalam implementasi program bantuan tersebut terdapat kendala-kendala teknis maupun manajerial seperti data sasaran program yang tidak valid, sarana pendukung distribusi bantuan yang terbatas, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh oknum implementator dalam penyaluran bantuan, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang sering menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Untuk mendorong ekonomi masyarakat

menuju pada terciptanya kesejahteraan sosial, maka ada beberapa kebijakan/program pemerintah yang telah dilaksanakan, diantaranya adalah:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan.
2. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.
3. Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus.
4. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
5. Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
6. Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
7. Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro.
8. Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal.
9. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro.
10. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
11. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil.
12. Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
13. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah.
14. Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

Program-program pemerintah tersebut walaupun dalam impementasinya masih terdapat banyak hambatan akan tetapi dampaknya

bagi peningkatan ekonomi kerakyatan dapat terlihat nyata. Banyaknya inovasi produk-produk UMKM di Indonesia saat ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan program-program tersebut.

Dibidang perikanan, indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah : (1) Indeks kesejahteraan masyarakat pesisir, dan (2) Pendapatan Domestik Bruto. Beberapa program pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha perikanan terealisasi dalam bentuk bantuan sarana prasarana (baik untuk perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolah dan pemasar ikan), program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) berupa bantuan modal usaha, program asuransi nelayan, program pendidikan bagi anak-anak pelaku utama perikanan, program pemberdayaan masyarakat pesisir, program kredit usaha perikanan, program sertifikasi tanah bagi pelaku utama perikanan, serta masih banyak program-program lainnya yang tujuan dan sasarannya adalah peningkatan kesejahteraan.

Program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat telah diimplementasikan sejak lama. Dari beberapa program tersebut, ada beberapa program yang masih berjalan sampai saat ini dan ada pula program yang telah dihentikan. Alasan penghentiannya tentu dari hasil evaluasi terhadap program tersebut dengan melihat dampak program yang nyata terhadap sasaran. Urgensi dilakukannya evaluasi terhadap program-program pemerintah khususnya program bantuan kepada masyarakat adalah untuk melihat sejauh mana dampak program

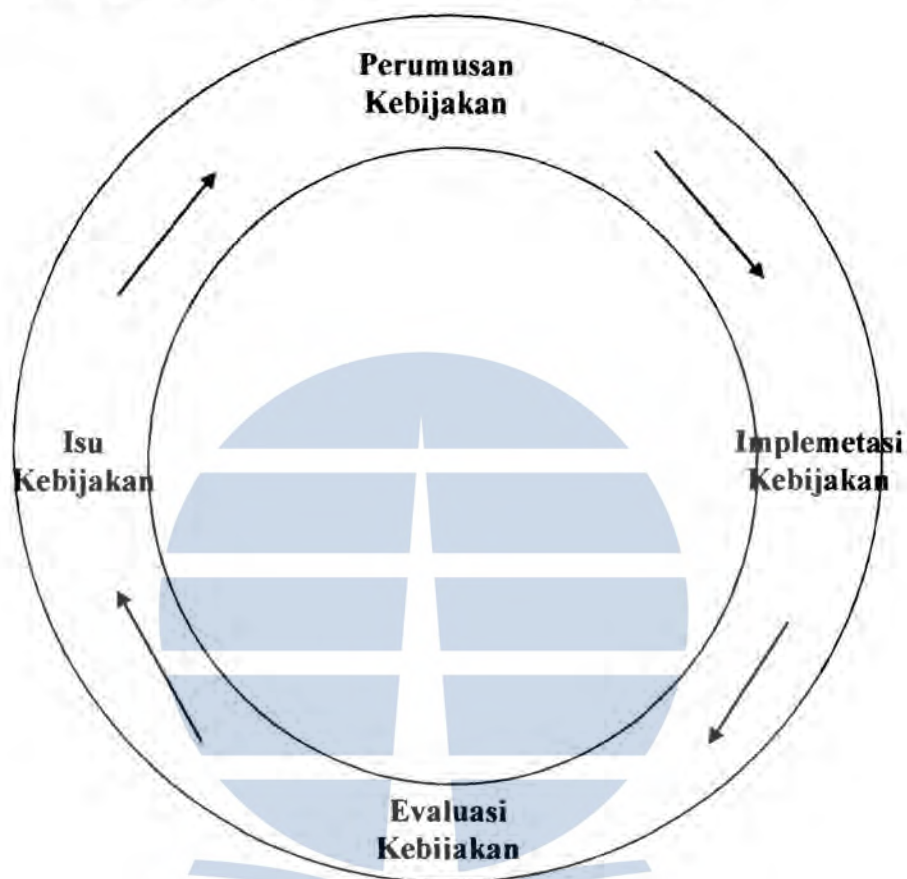
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan pada capaian indikator program tersebut.

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho., R. (2012) bahwa kebijakan publik adalah respon suatu bangsa dan negara terhadap suatu masalah, atau kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memanejemeni kehidupan bersama yang disebut sebagai negara dan bangsa. Hal senada juga disampaikan Dye., TR., (dalam LAN, 2008) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*whatever Goverments choose to do or not to do*" (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Tujuan kebijakan publik tersebut adalah untuk menjawab atau merumuskan serta memecahkan permasalahan-permasalahan publik yang muncul dari tuntutan masyarakat dalam bentuk alokasi nilai yang sifatnya otoritas dari pemerintah untuk diterapkan pada masyarakat. Seperti kebijakan bantuan sosial pertanian, merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam membantu usaha tani masyarakat agar mencapai produksi yang optimal, disamping meningkatkan taraf hidup masyarakat (petani), dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang sehat dan gizi yang seimbang, baik kualitas maupun kuantitasnya, seperti kebutuhan pokok manusia akan pangan. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah lebih memilih substansi pada petani berupa bantuan untuk budidaya komoditas pertanian baik disawah-sawah maupun di ladang para petani. Seperti untuk pembelian pupuk, bibit, saprodi dan upah menggarap lahannya, dengan harapan dapat meningkatkan hasil/produksi para petani.

Membuat kebijakan publik yang baik dan benar bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin. Berikut merupakan gambaran pemahaman dasar proses kebijakan:



Gambar 2.1 Pemahaman Dasar Proses Kebijakan

Menurut Nugroho., R (2012), pemahaman dasar proses kebijakan adalah: 1) Isu Kebijakan, isu kebijakan diangkat karena bersifat strategis, yakni menyangkut banyak orang, berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan perseorangan, dan memang harus diselesaikan; 2) Perumusan kebijakan, yang digerakan oleh isu kebijakan yang kemudian menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya; 3) Implementasi kebijakan, dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat; dan 4) Evaluasi kebijakan, untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan dan

diimplementasikan dengan baik dan benar. Dimana evaluasi kebijakan dapat menghasilkan suatu isu baru untuk suatu kebijakan yang lebih baik.

Evaluasi kebijakan menurut Samudro, dkk (1994) dilakukan untuk mengetahui : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan yang dinamakan juga evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi tahap kedua disebut evaluasi implementasi, evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan. Sedangkan evaluasi menurut Santoso (1992) adalah kebijakan mengkaji akibat-akibat pelaksanaan suatu kebijakan dan membahas hubungan antara cara-cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Studi evaluasi kebijakan (Sudiyono, 1992) merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif sehingga konsekuensinya lebih restrospeksi dibandingkan prospeksi. Dalam mengevaluasi, seorang analis berusaha mengidentifikasi efek yang semula direncanakan untuk merealisasi suatu keberhasilan dan dampak apa yang ditimbulkan dari akibat suatu kebijakan.

Berdasarkan pihak yang mengevaluasi (evaluator), evaluasi kebijakan publik dapat di lihat dari dua sudut pandang. Pertama, evaluasi dapat dilakukan secara internal. Evaluasi tersebut dilakukan oleh lembaga itu sendiri. Evaluasi ini dilakukan untuk mengamati birokrasi sejak zaman Weberian. Dalam *New Public Management*, evaluasi internal dilakukan dengan indikator kinerja. Kedua evaluasi eksternal, adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar dari pembuat kebijakan.

Menurut Samodra, dkk dalam Nugroho (2003:187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Ekspalanasi
Melalui Evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
2. Kepatuhan.
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrat maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit
Melalui Evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting
Dengan Evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut James Anderson dalam Winarno (2008:229) adalah sebagai berikut :

1. Tipe Pertama
Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kebijakan fungsional maka evaluasi tersebut sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
2. Tipe kedua
Merupakan tipe evaluasi yang mengfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
3. Tipe Ketiga
Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Evaluasi sistematis kebijakan juga merupakan aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya berupa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat, siapa yang menerima

keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan oleh organisasi. Berdasarkan ketiga tipe tersebut diatas, yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis. dimana peneliti ingin menganalisis sejauhmana dampak program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan terhadap perkembangan usaha kelompok sasaran, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Dampak Kebijakan Publik

Dampak menurut Suharyadi (2007) dalam Anggriani (2012) adalah perbedaan antara indikator hasil dengan program dan indikator hasil tanpa program. Tetapi, sulit untuk melihat seseorang atau sesuatu dalam keadaan yang berbeda pada saat yang bersamaan. Jadi, meskipun indikator hasil setelah program dapat diamati, indikator hasil tanpa program, yang biasa disebut sebagai kontra-fakta (counter-factual), tidak dapat diamati.

Evaluasi dampak menurut Samodra Wibawa dkk (1994: 29) memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya, sekalipun yang terakhir ini tidak di kesampingkan dari penelitian evaluatif. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tak diharapkan. Pada akhir implementasi kebijakan menilai pula

dampak-dampak yang tak terduga, yang di antaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tak diinginkan.

Dampak dari kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi. Menurut Winarno (2002:171-174) ada lima dimensi yang harus dibahas dalam mempertimbangkan dampak sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi :

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat
2. Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Dampak kebijakan pada keadaan sekarang dan yang akan datang
4. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
5. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi dampak kebijakan yaitu :

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut
2. Evaluasi Kebijakan berusaha untuk menilai kapasitas tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan menfokuskan

diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan

3. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dan penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Menurut Suharsono (2012: 122) dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Dampak kebijakan dalam hal ini melingkupi komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui kebijakan/program.
- b. Pelaksanaan Kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel dan adil. Selain juga untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri.

Menurut Soeprapto (2000:06) isu yang paling kritis dalam evaluasi dampak kebijakan adalah apakah suatu program telah menghasilkan efek yang lebih atau tidak yang terjadi secara alami meskipun tanpa intervensi atau dibandingkan dengan intervensi alternatif. Tujuan pokok penilaian dampak

adalah untuk menafsirkan efek-efek yang menguntungkan atau hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi.

Menurut Rossi dan Freeman (dalam Willian Dunn, 2000:36) bahwa penilaian atas dampak kebijakan adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal.

Untuk mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut (Winarno, 2002). Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas menurut Winarno (2002:184) berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna dan selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi, maka semakin besar pula efektivitasnya. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa program/kebijakan tersebut gagal. Akan tetapi, adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi baru terlihat setelah melalui beberapa proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, program/kegiatan. Di tinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana kebijakan dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangannya.

Berkaitan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar terpenuhinya sasaran dan tujuan yang ingin di capai. Selain itu juga menunjukkan sejauhmana organisasi mampu melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan penggunaan sumber daya (*resources*) secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Winarno (2002: 185); Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi juga merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai, maka berarti kebijakan tersebut boros dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Menurut Winarno (2002: 186), kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan secara teknis.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai keadilan dalam menentukan sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang didistribusikan secara adil. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya serta manfaatnya disitribusikan secara merata ((Winarno, 2002;187).

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Juga berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui

tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan (Winarno, 2002:189).

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut (Winarno, 2002: 184).

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa alat analisis dampak kebijakan publik baik kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Samudro dkk, 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi dampak yaitu :

- 1) *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analisis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
- 2) *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
- 3) *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analisis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.

4) *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran. Untuk mengetahui dampak suatu kebijakan atau program, metode yang paling baik digunakan adalah perbandingan sebelum dan sesudah program diimplementasikan bisa dengan menggunakan teknik evaluasi *single program before after* atau menggunakan teknik *comparative before after*. Metode analisis dan penyajian data secara kuantitatif biasanya disajikan dalam bentuk angka-angka dan perhitungan statistik, sedangkan metode kualitatif dapat disajikan dalam bentuk reduksi data (metode analisis Miles dan Huberman).

Data kualitatif lebih merupakan wujud kata-kata daripada deretan angka-angka dan senantiasa menjadi bahan utama dalam ilmu-ilmu sosial tertentu, seperti psikologi, sosiologi, ilmu bahasa, administrasi umum, kajian organisasi, perencanaan kota, penelitian pendidikan, evaluasi program, dan analisis kebijakan. Data kualitatif sangat menarik dan merupakan sumber dan deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif dapat diikuti dan dipahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Data kualitatif lebih condong dapat membimbing peneliti untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoretis baru.

Minat Miles lebih kearah penilaian lingkungan-lingkungan sosial (kelompok atau organisasi), dan pengaruh-pengaruh upaya mengubah perilaku, iklim,t dan struktur-strukturnya. Minat Huberman pula yaitu di

bidang epistemologi ilmiah, bagaimana teori-teori ilmiah dikembangkan dan diuji validitasnya. Seperti halnya Miles, Huberman bekerja secara empiris, dengan metodologi yang lebih lunak dan bersifat klinis, dipadukan dengan teknik-teknik psikometrik yang ketat. Selain dari penggunaan gabungan data yang lazim (wawancara formal dan informal, observasi dan observasi berpartisipasi, dokumen, kuesioner, dan pengujian), Huberman mencoba dua pendekatan analitis data yang sering dianjurkan oleh para ahli metodologi penelitian lapangan, tetapi jarang sekali dilaksanakan. Yang pertama, melibatkan pengujian pola-pola temuan (*finding*). Yang kedua dengan mengkuantifikasi data bukan angka (numerik) kemudian dilakukan analisis komparatif dan sejajar dengan menggunakan prosedur-prosedur psikometrik yang baku di samping teknik-teknik yang lebih deskriptif, tematik, dan konfigural.

Metode analisis data Miles dan Huberman ini disebut juga metode interaktif. Terdapat tiga komponen analisis dalam metode ini yaitu kondensasi data, sajian data dan penarikan simpulan/verifikasi. Aktifitas tiga rangkaian metode ini dapat berulang menjadi sebuah proses siklus.

5. Peningkatan Produktivitas Pelaku Utama Pengolah Hasil Perikanan

Terdapat berbagai macam pengertian produktivitas. *The Organization for European Economic Cooperation* (OEEC, 1950) dalam Astuti, dkk (2013) menyebutkan bahwa produktivitas merupakan hasil bagi antara output dengan keseluruhan atau salah satu faktor produksi yang digunakan, antara lain modal, investasi yang dikeluarkan dan bahan baku yang digunakan. Sinungan (2005) mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan ukuran harga bagi

masuk dan hasil, juga merupakan perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satuan-satuan (unit) umum. Secara ekonomi, produktivitas sering diukur berdasarkan rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Total produktivitas diukur berdasarkan rasio output dengan indikator input yang berbentuk profit, modal, energi dan bahan baku.

Pentingnya produktivitas mencakup banyak hal, dimulai dari produktivitas tenaga kerja, produktivitas organisasi, produktivitas modal, produktivitas pemasaran, produktivitas produksi, produktivitas keuangan dan produktivitas produk. Sumber daya manusia, modal dan teknologi menempati posisi yang amat strategis dalam mewujudkan tersedianya barang dan jasa. Pentingnya arti produktivitas dalam meningkatkan kesejahteraan telah disadari secara universal, tidak ada jenis kegiatan manusia yang tidak mendapatkan keuntungan dari produktivitas yang ditingkatkan sebagai kekuatan untuk menghasilkan lebih banyak barang-barang maupun jasa.

Secara umum, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik dengan masukan yang sebenarnya (ILO, 1979 dalam Astuti, dkk, 2013). Greenberg yang dikutip oleh Sinungan (2005) mengartikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. Pengertian lain produktivitas adalah sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa. Produktivitas menurut hasil konferensi Oslo (1984) seperti yang dikutip dari Astuti, dkk (2013), adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih

banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia, dengan menggunakan sumber-sumber riil yang makin sedikit.

Menurut Manuaba (1992) dalam Hamidun (2007) peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia (*do the right thing*) dan meningkatkan keluaran sebesar-besarnya (*do the thing right*). Dengan kata lain bahwa produktivitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektifitas kerja secara total.

Produktivitas menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi, dan keproduktifan. Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara output dengan input. Menurut Herjanto dalam wikipedia, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.

Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam menghasilkan barang atau jasa. Sehingga semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Tingkat produktivitas yang dicapai UKM merupakan indikator seberapa efisien UKM tersebut dalam mengkombinasikan sumber daya ekonomisnya saat ini. Anis, dkk (2007) menyatakan bahwa “usaha peningkatan produktivitas harus direncanakan secara baik dan sistematis sehingga berhasil apabila diaplikasikan kedalam suatu usaha. Tahap pengukuran, evaluasi, perencanaan dan perbaikan harus disesuaikan dengan

kondisi dan karakteristik masing-masing usaha.” Selanjutnya menurut Anis et.al pada umumnya terdapat 5 strategi yang dapat digunakan dalam menyusun usaha perbaikan produktivitas UKM, yaitu:

1. Meningkatkan input dan output, dimana perubahan/peningkatan output > daripada input.
2. Menurunkan input dan output, dimana perubahan/penurunan input > daripada output.
3. Input tetap output meningkat.
4. Input turun, output tetap.
5. Input turun, output meningkat.

Apabila usaha perbaikan produktivitas telah dilakukan, maka manfaat peningkatan produktivitas yang dapat diperoleh UKM yaitu:

- a. Peningkatan keuntungan bagi UKM.
- b. Peningkatan kualitas produk.
- c. Peningkatan upah kepada buruh.

Menurut Miller dan Meiner (1999;57) dalam jurnal Geyli Rugiyan (2013) menyatakan produksi merupakan konsep arus (*flow concept*) yang diukur sebagai tingkat-tingkat *output* per unit periode atau waktu sedangkan outputnya sendiri senantiasa di asumsikan konstan kualitasnya. Jadi berbicara mengenai peningkatan produksi, itu berarti peningkatan output dengan mengasumsikan faktor-faktor yang lain yang sekiranya berpengaruh tidak berubah sama sekali (konstan). Secara mudah, arti produksi adalah pembuatan. Pembuatan kue, baju, meubel, dan lain sebagainya akan lebih mudah dipahami oleh setiap orang bahwa semua itu dapat disebut sebagai

kegiatan berproduksi. Konsep analisis produksi berfokus pada penggunaan masukan input yang efisien untuk menciptakan output. Ini menyatakan bahwa produksi barang dan jasa dengan sasaran menetapkan cara yang optimal menggabungkan input untuk meminimalkan biaya. Untuk menjelaskan konsep produksi, perlu dikaji lebih jauh tentang konsep hubungan antara input dan output yang di sebut dengan fungsi produksi. Selanjutnya Joersan dan Fathorrozi (2003:77), menyatakan produksi merupakan hasil akhir dalam proses atau aktifitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input, dengan pengertian dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output.

Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu konsep yang paling sering digunakan yaitu melalui tingkat pendapatan. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai sisa dari pengurangan nilai penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diharapkan adalah pendapatan yang bernilai positif yaitu peningkatan pendapatan yang sejalan atau ekuivalen dengan peningkatan produksi.

Menurut soekatawi (1990:3-13) tingkat pendapatan dapat di pengaruhi oleh 4 faktor produksi yaitu lahan pertanian, tenaga kerja, modal dan manajemen. Modal usahatani di kelompokkan menjadi dua kategori yaitu :

1. Modal tetap adalah biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh atau dengan kata lain biaya yang penggunaannya tidak habis dipakai dalam satu masa produksi.

2. Modal tidak tetap (modal variabel) adalah biaya yang di keluarkan dalam proses produksi tersebut.

Pengembangan usaha berskala kecil dan mikro pada umumnya berada bidang pertanian arti luas (mencakup perkebunan, peternakan, perikanan, hasil hutan); pertambangan; industri dan perdagangan. Sektor perikanan sebagai salah satu pendukung sektor ekonomi memiliki peran dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu memberikan nilai tambah dan mempunyai nilai strategis, serta dapat memberikan manfaat finansial maupun ekonomi, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar merupakan salah satu modal dasar pengembangan perikanan yang nantinya akan semakin memegang peranan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat atau pengusaha, penciptaan lapangan kerja yang produktif. Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu kerjasama dan saling sinergitas antar pemangku kebijakan terkait usaha mikro kecil menengah termasuk juga pelaku usaha. Usaha pengolahan hasil perikanan lebih banyak berada di skala usaha mikro kecil. Menurut Fauzi (2006) dalam Nijikuluw (2006), skala usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dikelompokkan dalam beberapa skala, yaitu:

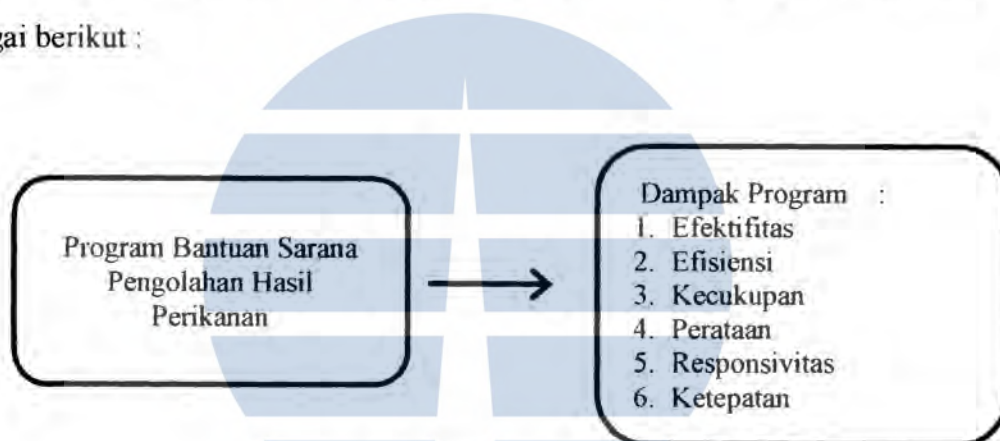
1. Kelompok usaha skala mikro adalah kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang setidaknya memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,- tetapi kekayaan itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
2. Kelompok usaha skala kecil adalah kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan kekayaan bersih mulai Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-, tetapi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
3. Kelompok usaha skala menengah adalah kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan kekayaan bersih mulai Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-, tetapi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
4. Kelompok usaha skala besar adalah kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan kekayaan bersih di atas 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.

Pengembangan kegiatan UMKM disektor usaha pengolahan hasil perikanan akan menjadi pilar atau tulang punggung pembangunan ekonomi Nasional. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan tatanan ekonomi yang memberi kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya kepada rakyat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan. Peningkatan usaha pengolahan hasil perikanan memerlukan campur tangan pemerintah dalam hal peningkatan produktivitas melalui bantuan sarana dan prasarana, pendampingan, penyediaan bahan baku, dan promosi. Produktifitas pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dapat dilihat melalui peningkatan produksinya, peningkatan pendapatannya, serta semangat atau motivasi mereka dalam mengembangkan usaha menghasilkan barang dan jasa. Dalam proses peningkatan produktifitas tersebut banyak faktor yang mempengaruhi, seperti modal usaha baik berupa modal dana maupun sarana dan prasarana, bahan baku, tenaga kerja, dan upah kerja. Salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka peningkatan produktifitas pelaku usaha pengolahan hasil perikanan adalah diimplementasikannya

program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan dalam rangka pengembangan usaha kelompok masyarakat untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka.

C. Kerangka Bepikir

Setelah mengkaji berbagai konsep mengenai dampak kebijakan publik diatas, maka disusun kerangka berpikir penelitian “Dampak Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan pada Kelompok Sasaran di Kabupaten Nunukan” sebagai berikut :



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

D. Operasionalisasi Konsep

Agar mendapatkan pemahaman yang tepat maka dalam penelitian ini dijabarkan operasionalisasi konsep sebagai berikut :

1. Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan adalah : Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan yang tertuang didalam Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Hasil Perikanan, Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan yang outputnya berupa bantuan sarana pengolahan hasil perikanan yang sifatnya hibah kepada masyarakat.

2. Dampak program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan adalah dampak yang dihasilkan akibat intervensi program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan agar diketahui penyebab permasalahan mengapa realisasi produksi kelompok sasaran tersebut tidak memenuhi target pemerintah daerah. Variabel –variabel yang di gunakan untuk mengetahui akibat dari intervensi program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan terhadap kelompok sasaran yang terdiri dari :
- a. Efektivitas adalah pencapaian hasil yang diinginkan. Indikator efektivitas terdiri dari informasi produktivitas kelompok sasaran dengan intervensi program yang mencakup informasi produksi, pendapatan, dan keberlanjutan usaha, serta informasi tentang motivasi kelompok sasaran program dalam upaya meningkatkan produktivitasnya.
 - b. Efisiensi adalah usaha-usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan. Indikator efisiensi terdiri dari informasi tentang bagaimana manajerial kelompok dalam mengelola bantuan sarana dan prasarana, modal, dan berbagai sumberdaya yang dimiliki demi peningkatan produktivitas kelompok, serta ada tidaknya target-target pencapaian produksi yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan.
 - c. Kecukupan adalah sejauhmana tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Indikator kecukupan adalah kesesuaian antara target produksi pengolahan hasil perikanan untuk kelompok sasaran dengan realisasi produksi olahan hasil perikanan kelompok sasaran.
 - d. Perataan adalah keadilan dalam menentukan sasaran kebijakan publik. Indikator untuk variabel perataan adalah perbandingan jumlah pelaku

usaha yang mendapatkan manfaat program dengan jumlah pelaku usaha yang tidak mendapatkan manfaat program.

- e. Responsivitas adalah tanggapan kelompok sasaran terhadap program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan, menguraikan tanggapan-tanggapan yang bersifat positif, kritik, maupun saran-saran atas program yang telah diimplementasikan.
- f. Ketepatan adalah nilai atau harga dari tujuan program. Indikator ketepatan adalah : (a) ketepatan sasaran program; dan (b) kesesuaian dampak program dengan tujuan yang diharapkan.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menjelaskan objek yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan kenyataan melalui teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Fokus permasalahan yang ingin digali adalah sejauhmana dampak program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan terhadap kelompok sasaran untuk melihat berhasil tidaknya program tersebut melalui variabel efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Pada bagan 3.1 berikut digambarkan alur kerja metodologi penelitian “Dampak Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Terhadap Kelompok Sasaran (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan”:



Bagan 3.1 Diagram alur penelitian

B. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2007:108). Bungin berpendapat bahwa terdapat dua cara memperoleh informan penelitian yaitu (1) *snowball sampling* dan (2) *key person*.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memperoleh informasi dari *key person*. Lebih lanjut Bungin (2007:77) mengemukakan untuk memperoleh informan penelitian melalui *key person* digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga ia membutuhkan *key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi.

Karena kajian penelitian ini pada dampak program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan terhadap kelompok sasaran melalui beberapa variabel, maka yang lebih tepat dan layak sebagai narasumber tentu pihak-pihak yang berkepentingan dan mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan, dengan demikian diharapkan akan sangat membantu dalam memperoleh data yang akurat dan reliabel serta untuk efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan waktu, tenaga dan biaya penelitian.

Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran Perikanan, dan Kelembagaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan.
2. Kelompok Sasaran Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan terdiri dari:
 - a). Poklahsar Mina Barokah,
 - b). Poklahsar Kramat Jaya,

- c). Poklahsar Indah Lestari,
- d). Poklahsar UP2K Praja Nusa,
- e). Poklahsar UKM. Cahaya Madinah,
- f). Poklahsar Alvina,
- g). Poklahsar Rina Home Cake,
- h). Poklahsar Melati Putri,
- i). Poklahsar Kopwan Arafah,
- j). Poklahsar Melati Indah I,
- k). Poklahsar Ika Abadi,
- l). Poklahsar Damai Sejahtera,
- m). Poklahsar Koperasi Bahtera Delima,
- n). Poklahsar Koperasi Mina Harapan Sejahtera,
- o). Poklahsar Anggrek,
- p). Poklahsar Sinar Harapan,
- q). Poklahsar Hawa Mandiri, dan
- r). Poklahsar KUBE An-Nur.

Karena sumber informan hanya sedikit, maka penelitian ini disebut juga penelitian populasi.

Informan utama yang juga mendukung penelitian ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan.

C. Instrumen Penelitian

Berdasarkan tujuan dan konsepsi penelitian, maka disusun instrumen penelitian sebagai berikut :

1. Pedoman observasi yaitu instrumen penelitian yang berbentuk daftar berbagai hal yang akan diamati dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian meliputi variabel efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Pedoman Observasi – terlampir).
2. Pedoman wawancara yaitu sejumlah pertanyaan, sebagai pedoman dalam mengakses data informasi yang akan digunakan dalam analisis data penelitian. (Pedoman wawancara – terlampir).

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang diperlukan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Sedangkan data primer merupakan data yang penulis peroleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi.

Pengumpulan data dan informasi guna keperluan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan kombinasi teknik-teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan teknik dokumentasi untuk mendapatkan informasi data primer dan sekunder.

1. Observasi, merupakan teknik atau metoda pengumpulan data serta informasi diluar responden, data dan informasi diperoleh melalui pengamatan dan diikuti dengan percakapan biasa.
2. Wawancara mendalam (*depth interview*) merupakan teknik wawancara dengan bertanya kepada informan baik informan utama maupun *key informan*. Metoda ini kemungkinan dapat mengungkap informasi lain yang

sangat dibutuhkan yang diperkirakan sulit didapat jika dilakukan dengan menggunakan teknik kuisioner.

3. Metode dokumentasi dilakukan untuk mempelajari dokumen-dokumen program bantuan sarana pengolahan, laporan produksi kelompok sebagai data dan bahan dalam menganalisa data sekunder.

E. Metode Analisis Data

Melalui metode analisis data, peneliti menguji kemampuan bernalar dalam mengelaborasi fakta, data dan informasi yang diperoleh. Selanjutnya, peneliti menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan informasi dan kebenaran dari setiap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

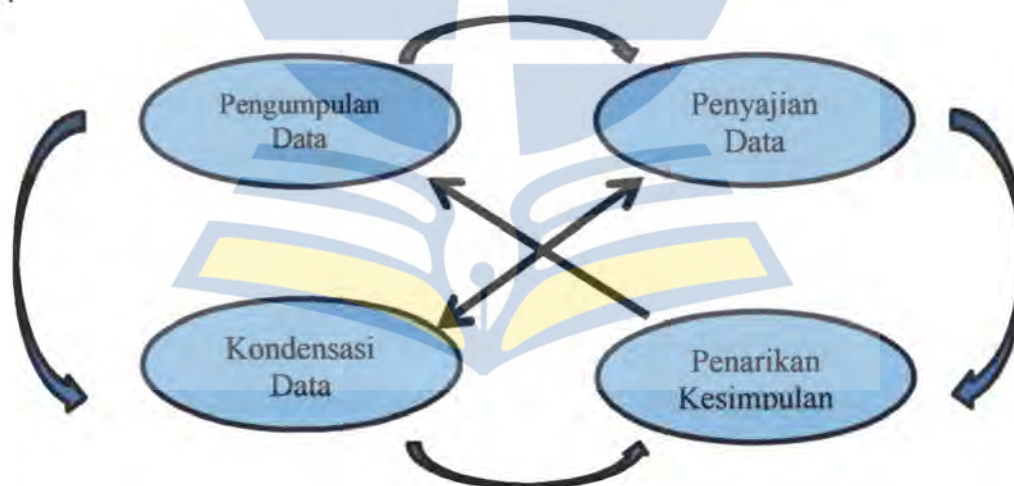
Dalam penelitian kualitatif, menurut Bungin Burhan (2008:78) “prosedur pengolahan data adalah juga metode analisis data, sehingga proses pengumpulan data juga adalah proses analisis data, karena itu setelah data dikumpulkan, maka sesungguhnya peneliti sudah menganalisis datanya”.

Sedangkan Rumusan Miles & Huberman dalam Saldana, (2014:14) menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat 4 alur kegiatan yaitu : pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- 1) Pengumpulan data yaitu segala bentuk kegiatan dalam rangka merangkum data-data dan informasi yang diperlukan baik data primer maupun sekunder untuk kebutuhan penelitian.
- 2) Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksikan dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.

- 3) Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk apa melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
- 4) Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang penting, karena dari permulaan pengumpulan data seseorang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan preposisi. Kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan.

Model analisis interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini :



Gambar 3.1 Proses Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Berangkat dari asumsi model Miles dan Huberman ini, maka penulis menggabungkan prosedur pengolahan data dan analisis data dengan tahapan sistematis sebagai berikut :

- a. Klasifikasi materi data, diantaranya adalah :
 - Data Primer, diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan, baik unsur Dinas Kelautan dan Perikanan maupun kelompok sasaran program yaitu pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan.
 - Data Sekunder, diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan berupa data statistik kelautan dan perikanan, dokumen Renstra, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Mengklasifikasikan berbagai gejala dan faktor-faktor serta kondisi yang ada dalam pelaksanaan program bantuan dengan berbagai komponen yang telah ditetapkan sesuai dengan yang ada dalam kerangka fikir.
- c. Mengolah data berdasarkan keterkaitan antara komponen yang ada dan disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan pada fokus permasalahan.
- d. Mendeskripsikan secara keseluruhan dari hasil wawancara, observasi dokumen dan beserta pedoman dari berbagai literatur dan buku yang ada, secara sistematis, dan keterkaitan yang menjadikan penelitian ini dapat dipahami dan memberikan suatu pengetahuan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Dalam hal ini berupa uraian yang memaparkan fakta-fakta di lapangan yang dianggap penting untuk memperoleh informasi tentang dampak program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan.
- e. Setelah kaitan antara semua kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak

terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain. Selanjutnya memaknai hasil deskripsi data sehingga jawaban terhadap pertanyaan penelitian bisa terungkap.

- f. Dari jawaban tersebut, penulis kemudian menyimpulkan secara komprehensif pelaksanaan dampak program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan terhadap kelompok sasaran, hambatan dan cara penyelesaiannya yang diharapkan menghasilkan rekomendasi sehingga bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan selanjutnya.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

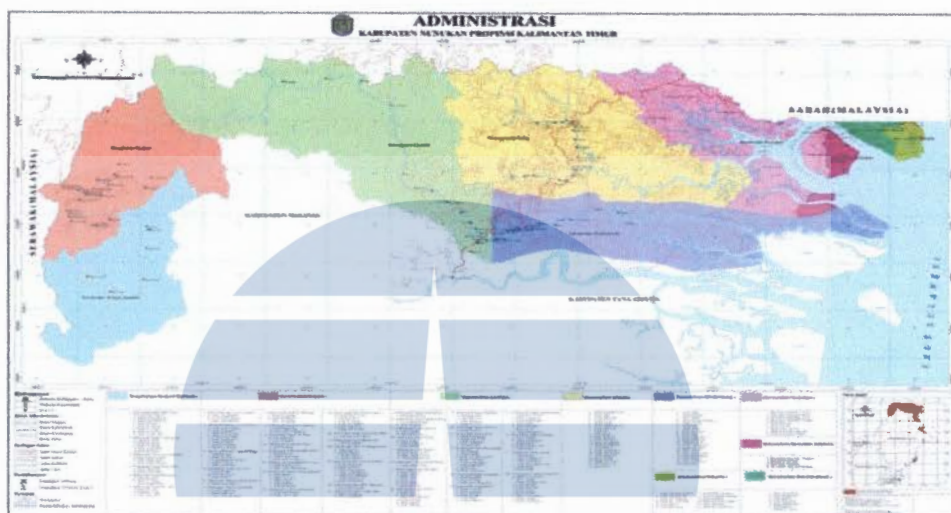
1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan berdiri pada tahun 1999 merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan terletak antara 115°33' sampai dengan 118°3' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara merupakan wilayah paling utara dari Propinsi Kalimantan Utara. Posisinya yang berada didaerah perbatasan Indonesia – Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara.

Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur - Sabah, Sebelah Timur Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur - Serawak.

Kabupaten Nunukan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan memiliki luas wilayah 14.247,50 Km², panjang garis pantai 314.592 Km, luas perairan 304.867 Ha, dan potensi hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan mencapai 620.313,06 Ha, serta memiliki 10 (sepuluh) buah sungai dan 29 (dua puluh sembilan) pulau. Sungai terpanjang di Kabupaten Nunukan adalah Sungai Sembakung dengan panjang 278 Km sedangkan Sungai Tabur merupakan sungai terpendek dengan panjang hanya 30 Km.

Sejak Tahun 2012 secara administratif wilayah Kabupaten Nunukan terbagi dalam 16 (enam belas) wilayah kecamatan yang sebelumnya hanya 9 (sembilan) kecamatan, dimana 13 (tiga belas) kecamatan diantaranya merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia (Sabah dan Serawak).



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan berada di wilayah katulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan November – April dan Muson Timur pada bulan Mei - Oktober.

Secara demografis, penduduk Kabupaten Nunukan tersebar di 16 (enam belas) kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Nunukan, kemudian diikuti oleh Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Seimanggaris, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Krayan, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebatik

Utara, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sembakung Atulai, dan jumlah penduduk terkecil ada di Kecamatan Krayan Selatan. Jumlah penduduk dan pola kepadatan penduduk sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2010 – 2014 Menurut Kecamatan (jiwa)

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014
Nunukan	54.034	50.322	53.212	56.165	59.223
Nunukan Selatan	12.355	14.079	15.504	17.043	18.717
Sebatik Barat	10.464	6.941	7.160	7.380	7.606
Sebatik	22.344	4.115	4.245	4.375	4.510
Sebatik Timur	-	11.093	11.442	11.794	12.156
Sebatik Utara	-	5.003	5.161	5.319	5.483
Sebatik Tengah	-	6.498	6.703	6.909	7.121
Sei Menggaris	-	7.402	7.827	8.262	8.711
Tulin Onsoi	-	6.373	6.742	7.120	7.513
Sebuku	15.014	9.689	10.250	10.826	11.424
Sembakung	8.201	8.218	8.345	8.459	5.844
Sembakung Atulai	-	-	-	-	2.722
Lumbis	9.959	4.791	4.834	4.870	4.901
Lumbis Ogong	-	5.092	5.138	5.176	5.209
Krayan	7.296	7.037	6.976	6.902	6.823
Krayan Selatan	2.260	2.169	2.141	2.111	2.079
Jumlah Total	141.927	148.822	155.680	162.711	170.042

Sumber: Nunukan Dalam Angka 2015 <http://nunukankab.bps.go.id>

Menurut buku Nunukan Dalam Angka Tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2014 sebanyak 170.042 jiwa atau naik 19,81 persen dibandingkan tahun 2010. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Nunukan yaitu 59.223 jiwa atau sekitar 34,83 persen, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Krayan Selatan yaitu 2.079 jiwa atau sekitar 1,22 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan rata-rata 4,62

persen selama lima tahun terakhir (2010 - 2014). Sementara jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan dengan batasan umur 15 tahun dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Kabupaten Nunukan Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama 2010 – 2014 (%)

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014
Angkatan Kerja	6,06	68,68	70,89	67,42	71,92
• Bekerja	60,07	62,14	62,50	60,21	67,82
• Mencari Kerja	4,99	6,54	8,39	7,21	4,10
Bukan Angkatan Kerja	34,94	31,32	29,11	32,58	28,08
• Sekolah	9,31	6,85	4,31	8,24	9,83
• Mengurus Rumah tangga	22,86	21,63	21,07	23,27	14,65
• Lainnya	2,77	2,84	3,73	1,07	3,60
Jumlah Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Nunukan Dalam Angka 2015 <http://nunukankab.bps.go.id>

Dari jumlah penduduk tahun 2014, jumlah angkatan kerja sebesar 122.294 jiwa dengan rincian 67,82 % telah bekerja dan 4,10 % sedang mencari pekerjaan dan tidak bekerja. Dari jumlah penduduk yang bekerja terdapat 6,7% yang bekerja pada sektor perikanan dan 0,27% bekerja di sektor usaha pengolahan hasil perikanan, sisanya bekerja pada sektor-sektor lainnya.

2. Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan

Paradigma *blue economy* atau orientasi pembangunan kearah kelautan dan perikanan didukung salah satunya melalui kegiatan pengolahan hasil perikanan. Pengolahan merupakan kegiatan pasca panen yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi suatu komoditas. Kegiatan pengolahan hasil perikanan mempertimbangkan potensi komoditas yang paling berkembang untuk mendukung tercapainya

pemanfaatan yang optimal. Pengolahan hasil perikanan adalah upaya yang dilakukan terhadap sumberdaya ikan melalui proses pengolahan secara tradisional maupun modern, baik secara fisika, kimia, mikrobiologis atau kombinasinya, untuk dijadikan produk akhir yang dapat berupa ikan segar, ikan beku dan bentuk olahan lainnya, guna mengawetkan dan memperbaiki penampilan (*appearance*) sifat-sifat fisika, kimia dan nilai gizi serta nilai tambahnya (*value added*) untuk memenuhi konsumsi manusia. Pada dasarnya dalam teknologi pengolahan hasil perikanan terdapat 10 teknis/cara pengolahan yaitu :

1. Pembekuan, contoh : udang beku, tuna beku, dan lain-lain.
2. Pengalengan : contoh tuna kaleng, sarden, kepiting can.
3. Penggaraman/pengeringan, contoh: Ikan asin kering, Ebi, Teri Ambalat, dan lain-lain.
4. Pemindangan, contoh : pindang bandeng, pindang kembung, dan lain-lain.
5. Pengasapan, contoh : Cakalang fufu
6. Peragian/fermentasi, contoh : kecap ikan, terasi, petis, dan lain-lain.
7. Pereduksian/Pengekstrasian, contoh : tepung ikan, chitin, citosan, karagenan, agar-agar, minyak ikan.
8. Pengolahan Surimi dan Jeli Ikan, contoh : surimi, baso ikan, sosis ikan, nugget.
9. Pengolahan Produk Segar, contoh : Bandeng Cabut Duri, Kerang Darah Kupas.
10. Pengolahan lainnya, dalam artian pengolahan yang tidak termasuk dalam kategori yang telah disebutkan diatas., contoh : pengolahan abon, kerupuk, dodol, dan lain-lain.

Hasil dari 10 teknis/cara pengolahan tersebut diatas itulah yang dinamakan produk olahan. Pemanfaatan potensi perikanan menjadi produk

bernilai tambah melalui kegiatan pengolahan hasil perikanan mendapat perhatian yang sangat baik dari pemerintah baik pusat maupun daerah, oleh karena itu beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan dapat dilihat melalui program penyediaan sarana dan prasarana diantaranya yaitu dalam bentuk bantuan hibah kepada masyarakat.

Di Kabupaten Nunukan kegiatan pengolahan hasil perikanan sudah sejak lama berlangsung, akan tetapi kegiatan tersebut masih bersifat tradisional seperti pengolahan pengeringan (ikan asin kering, udang kering, teri kering, cumi kering), dan pengolahan segar (kerang darah kupas, udang kupas). Seiring perkembangan teknologi dan arus transmigrasi di Kabupaten Nunukan sehingga banyak pendatang yang masuk dan menetap di wilayah Kabupaten Nunukan menyebabkan banyak berkembang usaha-usaha skala mikro kecil yang salah satunya yaitu usaha pengolahan makanan dengan bahan baku ikan seperti contoh kerupuk ikan/rumput laut (amplang, kerupuk tempe rumput laut, kerupuk kertas rumput laut, stick balado rumput laut, krispy rumput laut, dan lain-lain), bandeng tanpa duri, bandeng presto, terasi, surimi, bakso ikan, abon, dodol, manisan, coklat dodol/cokkodol, es krim rumput laut, kue-kue berbahan dasar rumput laut, mie rumput laut, dan produk-produk lainnya. Untuk lebih jelasnya pada tabel 4.3 berikut menggambarkan data eksisting produk olahan hasil perikanan beserta pelaku usahanya di Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.3 Data Pelaku Utama Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan

No.	Pelaku Usaha	Alamat	Produk Olahan
1.	POKLAHSAR Mina Barokah	Jl. Patimura Sei. Sembilan RT. 18 Nunukan Selatan	Bandeng Cabut Duri
2.	POKLAHSAR Indah Lestari	Jl. Pangeran Antasari Kel. Nunukan Timur	Kerupuk Teri Ambalat Wijen, Kerupuk Teri Ambalat Crispy, Abon Bandeng, Abon Ebi Super Pedas, Kue Kelapa Rumput Laut
3.	POKLAHSAR Alvina	Jl Imam Bonjol RT. 06 Kel. Nunukan Timur	Kerupuk Rumput Laut, Kerupuk Udang Bawang, Amplang Ikan Bulan, Kerupuk Stick Rumput Laut, Mie Rumput Laut
4.	KOPWAN Arafah	Jl. Sutanto RT. 08 Kel. Nunukan Tengah	Abon Ikan Tuna, dan Abon Ebi
5.	POKLAHSAR An-Nur	Jembatan Sei Mentri RT. 12 Kel. Nunukan Barat	Kerupuk Stick Rumput Laut, Kerupuk Kaktus Rumput Laut, Kue Bolu Rumput Laut, Mie Rumput Laut, Amplang Bulan
6.	POKLAHSAR UKM. Cahaya Madinah	Jl. Ujang Dewa RT. 01 Kel. Nunukan Selatan	Kerupuk Kertas Rumput Laut Keju, Amplang Bandeng, Dodol Rumput Laut, Manisan Rumput Laut, Madu Mongso Rumput Laut, Es Krim Rumput Laut
7.	POKLAHSAR Melati Putri	RT. 03 Desa Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur	Es Krim Rumput Laut, Kerupuk Ikan Teri, Kerupuk Ebi, Kue Mentega Rumput Laut, Cake Rumput Laut, Kue Bangke Rumput Laut
8.	Koperasi Bahtera Delima	Jembatan Inhutani Ujung Kel. Nunukan Utara	Surimi Tenggiri, Surimi Bulan, Surimi Lamadang, Udang HO, Udang HL, Udang Kupas, Amplang Bulan, Bakso Ikan, Lekor.
9.	POKLAHSAR Rina Home Cake	Jl. Hasanuddin RT. 08 Kel. Nunukan Tengah	Keripik Ikan, Kerupuk Stick Ikan, Abon Ikan Pedas, Bakso Ikan
10.	POKLAHSAR Ifmawati	Jl. H. Junnudi RT. 04 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik	Amplang Teri Ambalat
11.	POKLAHSAR Bina Usaha	RT. 07 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi
12.	POKLAHSAR Cahaya Purnama	RT. 07 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi

Bersambung...

Sambungan tabel 4.3

No.	Pelaku Usaha	Alamat	Produk Olahan
13.	POKLAHSAR Binalawan Mandiri	RT. 01 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi
14.	POKLAHSAR Binalawan Makmur	RT. 01 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi
15.	POKLAHSAR Cahaya Purnama	RT. 07 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi
16.	POKLAHSAR Sebatik Sukses	RT. 01 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi
17.	POKLAHSAR Bina Lestari	RT. 07 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi
18.	POKLAHSAR Blue Sea Lestari	Jl. Bhayangkara RT. 11 Kec. Sei Nyamuk	Kerupuk Ikan Tenggiri, Kerupuk Teri, Lekor Tenggiri, Amplang
19.	POKLAHSAR Nurul Yaqin	Jl. Jenderal Sudirman RT. 01 Desa Sei Manurung Kec. Sebatik	Abon Cakalang, Amplang Tenggiri, Teri Bon, Kerupuk Udang, Kerupuk Teri, Serondeng Udang.
20.	Kelompok Teri Ambalat	Jl. Jenderal Sudirman RT. 04 Desa Sei Manurung Kec. Sebatik	Amplang
21.	IKM Karima	Jl. Ujang Dewa Gg. Limau Kel./Kec. Nunukan Selatan	Keripik Rumput Laut Tempe
22.	IKM Zakina	Jl. Ujang Dewa Kel./Kec. Nunukan Selatan	Cakalang Fufu, Cakfu Rica-rica
23.	IKM Takalar	Jl. Yos Sudarso Kel. Tg. Harapan/Mamolo Kec. Nunukan Selatan	Kerupuk Stick Rumput Laut, Bakso Ikan
24.	IKM Harapan Baru	Jl. Yos Sudarso Kel. Tg. Harapan/Mamolo Kec. Nunukan Selatan	Terasi Udang Rumput Laut Pedas

Sumber: Tesis Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan (Patriani, 2016)

Menurut Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan seperti yang terlihat pada tabel 4.3 bahwa pelaku utama pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan dilakukan oleh orang perorangan dan kelompok. Untuk kelompok terdiri dari Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) yang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan dan Koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan. Sistem POKLAHSAR dan Koperasi terdiri atas ketua dan anggota.

Perkembangan produk olahan hasil perikanan yang merupakan produksi pelaku utama POKLAHSAR di Kabupaten Nunukan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakatnya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan dalam rangka membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya untuk pengembangan UMKM khususnya di Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan dalam bentuk Kegiatan Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan. Output kegiatan ini berupa sarana produksi kerupuk, abon, dodol, surimi, bakso ikan, dendeng ikan, bandeng presto, terasi, sarana pengeringan ikan, kemasan berlabel, serta ada pula dalam bentuk bantuan modal yaitu dana Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan tepatnya pada tahun 2013. Penerima manfaat program tersebut yaitu kelompok-kelompok pengolah hasil perikanan atau yang disebut juga POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar), dan ada pula bantuan untuk perorangan. Pada Tabel 4.4 berikut menggambarkan output bantuan sarana pengolahan hasil perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 4.4 Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan

Tahun	Kegiatan	Output	Sasaran
2008	Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan (Paket alat-alat Sarana Pengolahan Surimi dan Produk Turunannya)	a. Fish Meat Bone Separator b. Grinder Bumbu c. Meat Ball Mier d. Tangki Perebusan e. Freezer f. Cool Box g. Sealer h. Timbangan Elektrik i. Panci Presto	Poklahsar Mina Barokah
2008	Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan (Paket Pengeringan Ikan)	a. Panci Besar (40 unit) b. Bak Penampungan Ikan/ Udang (40 unit)	Pelaku utama pengolah ikan kering asin dan ebi
2009	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Paket Pengadaan Bantuan Sarana Pengolahan Ikan)	a. Sarana Pengolahan Dendeng Ikan (1 Paket) b. Sarana Pengolahan Presto Ikan (1 Paket)	Poklahsar Mina Barokah, Poklahsar Kramat Jaya
2010	Bantuan Sarana Pengolahan Rumput Laut	a. Pisau b. Telenan c. Keranjang/Trays d. Grinder e. Mixer f. Wadah Pengukusan g. Para-para penjemuran h. Ember i. Alat Pemetong Kerupuk j. Sealer k. Timbangan Kap. 100 Kg l. Timbangan Kap. 20 Kg	Poklahsar. Indah Lestari, Poklahsar. Praja Nusa
2012	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Serta Penyuluhan Perikanan (DAK dan Pendamping)	a. Sarana Pengolahan Abon Ikan b. Sarana Pengolahan Kerupuk Ikan c. Sarana Kemasan Berlabel	Poklahsar. Indah lestari, Melati Indah I, Arafah, Ika Abadi, RHC, Damai Sejahtera, Cahaya Madinah, Alvina, Bahtera Delima, Anggrek, Melati Puteri, Mina Harapan Sejahtera.
2013	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Serta Penyuluhan Perikanan (DAK)	Sarana Pengolahan Terasi	Poklahsar Melati Indah I, Sinar Harapan, Hawa Mandiri

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, sumber dana bantuan sarana pengolahan hasil perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama Dana Alokasi Khusus (DAK). Sejak tahun 2008 hingga 2013 hampir setiap tahun dianggarkan dana untuk bantuan sarana pengolahan hasil perikanan ini. Indikator kegiatan bantuan sarana pengolahan hasil perikanan ini berupa peningkatan produksi. Apabila dibandingkan antara produksi dan pendapatan kelompok sasaran sebelum program dan setelah program memang terlihat ada peningkatan, namun total produksi kelompok sasaran belum memenuhi target yang ditentukan oleh Pemerintah daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap program/kegiatan bantuan sarana pengolahan hasil perikanan ini dimana salah satu indikator dari evaluasi tersebut yaitu dampak bantuan tersebut terhadap masyarakat baik dari segi produktivitas kelompok sasaran program maupun motivasinya dalam pengembangan usaha dibidang pengolahan hasil perikanan.

Dampak Program Bantuan

B. Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka mengevaluasi program/kegiatan bantuan sarana pengolahan hasil perikanan, maka perlu dianalisis dampak bantuan tersebut terhadap masyarakat agar dapat diketahui penyebab keberhasilan maupun kegagalan dari program/kegiatan tersebut. Berikut diuraikan hasil temuan dilapangan mengenai dampak program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan sekaligus pembahasannya.

1. Efektivitas

Setiap kebijakan pemerintah yang diimplementasikan didalam suatu wilayah pastinya memiliki tujuan yang positif, begitupun halnya dengan program bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Tujuan dari program/kegiatan tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku utama pengolahan hasil perikanan. Melalui penelitian dampak bantuan sarana pengolahan hasil perikanan ini, salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut yaitu melalui penilaian terhadap efektifitas program pada kelompok sasaran. Efektivitas yaitu pencapaian hasil yang diinginkan. Keberhasilan program dapat dilihat dari peningkatan produktivitas kelompok sasaran. Produktivitas menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi, dan keproduktifan. Produktivitas dalam penelitian ini dapat dinilai dari peningkatan produksi, pendapatan, dan keberlanjutan usaha, serta motivasi kelompok sasaran dalam upaya mengembangkan usahanya.

Dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan ditetapkan indikator kinerja utama bidang pengolahan hasil perikanan berupa : a). Produksi pengolahan hasil perikanan; b). Pemasaran hasil produksi perikanan; c). Konsumsi ikan; d). Cakupan binaan kelompok pengolahan; dan e). Produksi perikanan kelompok pengolahan. Untuk indikator produksi pengolahan hasil perikanan dan produksi perikanan kelompok pengolahan dapat dicapai melalui program

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan dimana salah satu kegiatannya adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Perikanan serta Penyuluhan Perikanan dengan output berupa bantuan sarana pengolahan hasil perikanan. Bantuan yang diberikan bersifat hibah atau diserahkan langsung kepada masyarakat. Sasaran program merupakan perorangan maupun kelompok tergantung dari persyaratan yang telah ditetapkan didalam Petunjuk Teknis kegiatan. Untuk dana APBN biasanya mensyaratkan penerima manfaat program harus dalam bentuk kelompok Pengolah Hasil Perikanan atau POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar) yang terdiri dari minimal 10 (sepuluh) orang yang memiliki usaha yang sama yaitu usaha pengolahan hasil perikanan. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBD biasanya tidak mewajibkan penerima manfaat program harus dalam bentuk kelompok, perorangan juga bisa menjadi penerima manfaat asalkan terbukti mata pencahariannya dibidang pengolahan hasil perikanan.

Target produksi olahan hasil perikanan secara keseluruhan dan target produksi kelompok binaan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Tabel Target dan Realisasi Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Tahun	Target (Ton)		Realisasi (Ton)	
	Perorangan	Kelompok	Perorangan	Kelompok
2011	3.797	189,85	8.149,18	18,85
2012	3.979	948,9	12.838,07	20,72
2013	4.161	1.111	15.534,00	310,7
2014	4.344	1.272	36.347,92	312,02
2015	4.526	1.434	25.916,30	134,55

Sumber : RPJMD dan LAKIP DKP Kab. Nunukan Tahun 2008 – 2013 (Diolah)

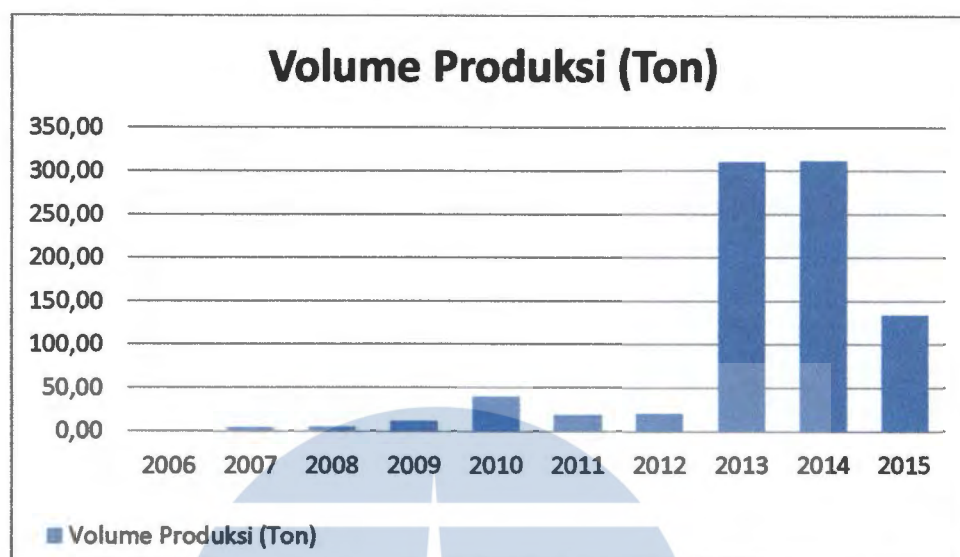
Target keseluruhan produksi olahan hasil perikanan Kabupaten Nunukan sebesar 32.807 Ton, dari total target produksi tersebut diharapkan sebesar 4.956 Ton bisa diperoleh dari produksi kelompok binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan yang dalam hal ini merupakan kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan. Tetapi kenyataannya apabila dirata-ratakan produksi olahan hasil perikanan dalam 5 (lima) tahun terakhir antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 hanya 14,8% target yang terealisasi dari harapan 100%. Realisasi produksi pengolahan hasil perikanan untuk kategori perorangan melebihi target disebabkan kontribusi hasil produksi rumput laut kering yang hampir mendominasi total produksi yaitu hampir 90%, sedangkan produk olahan ikan lainnya khususnya produk olahan konsumsi hanya sekitar 10% dari total produksi olahan perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi produksi olahan perorangan untuk produk konsumsi pun masih rendah yaitu hanya mencapai 10% dari total 100% yang diharapkan. Masih banyak produk olahan perikanan di Kabupaten Nunukan yang dijual dalam bentuk *raw material* sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi pelaku utamanya. Realisasi produksi kelompok sasaran program bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Tabel Realisasi Produksi Kelompok Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan

No	Nama Kelompok Sasaran Program (Poklahsar)	Volume Produksi Per Tahun (Ton)									
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mina Barokah	-	450	200	460	35.800	4.500	5.760	60.700	47.527	408
2.	Kramat Jaya	-	-	20	35	-	-	-	-	-	-
3.	Indah Lestari	1.000	1.200	1.500	2.200	2.500	2.500	2.300	2.500	1.500	1.000
4.	UP2K Praja Nusa	-	50	10	150		20	12	80	120	350
5.	UKM. Cahaya Madinah	-	-	-	-	200	380	500	1.450	38.674	46.800
6.	Alvina	-	2.500	2.700	2.850	1.600	1.850	2.000	23.560	42.820	32.065
7.	Rina Home Cake	-	-	-	-	-	680	40	8.080	8.281	1.220
8.	Melati Putri	-	-	-	200	-	300	800	15.655	16.540	5.520
9.	Kopwan Arafah	-	-	-	35	-	20	25	200	250	158
10.	Melati Indah 1	-	-	-	-	-	10	15	250	300	660
11.	Ika Abadi	-	-	-	-	-	35	20	50	80	100
12.	Damai Sejahtera	-	-	-	-	-	20	20	80	100	125
13.	Koperasi Bahtera Delima	-	-	-	6.000	-	8.500	9.209	182.614	135.349	29.670
14.	Koperasi Mina Harapan Sejahtera	-	-	-	10	-	15	10	20	20	45
15.	Anggrek	-	-	-	-	-	20	10	-	-	-
16.	Sinar Harapan	-	-	-	-	-	-	-	20	80	100
17.	Hawa Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	10	40	50
18.	KUBE An-Nur.	-	-	-	-	-	-	-	15.435	20.340	16.281
Total		1.000	4.200	4.430	11.940	40.100	18.850	20.721	310.704	312.021	134.552

Tabel 4.6 diatas menggambarkan produksi olahan kelompok sasaran sebelum implementasi program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan yaitu tahun 2006 – 2007 dan setelah implementasi program yaitu antara tahun 2008 – 2015. Dapat dilihat peningkatan produksi yang cukup tinggi pasca implementasi program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Selain itu, terdapat beberapa kelompok yang usahanya bersifat musiman sehingga hasil produksinya pun tidak mengalami peningkatan. Juga terdapat dua kelompok yang non aktif pasca mendapatkan bantuan dari DKP Kabupaten Nunukan. Sebagai gambaran, fluktuasi volume produksi olahan

hasil perikanan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Gambar Diagram 4.2 berikut:



Gambar 4.2 Diagram Fluktuasi Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan Per Tahun

Realisasi produksi olahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan seperti yang terlihat pada gambar 4.2 diatas menunjukkan hasil yang fluktuatif. Bila dibandingkan antara sebelum aplikasi program yaitu tahun 2006 dan 2007, produksi olahan hasil perikanan kelompok pengolah terbilang rendah sekitar 1 – 4 ton per tahun, setelah diimplementasikannya program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan pada tahun 2008 sampai dengan 2015 terlihat peningkatan produksi kelompok yang cukup tinggi yaitu dikisaran 11 – 300 ton per tahun, walaupun terjadi penurunan produksi di tahun 2015 yang diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi sehingga membuat daya beli masyarakat berkurang.

Seiring dengan implementasi program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan sejak tahun 2008 sampai dengan 2013, berkembang pula

jenis-jenis produk olahan dari bahan baku ikan dan rumput laut di Kabupaten Nunukan. Pada tabel 4.7 berikut merupakan jenis-jenis produk olahan hasil perikanan yang berkembang di Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.7 Jenis-jenis Produk Olahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan

Perlakuan	Jenis Produk
Pengeringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teri Ambalat 2. Ikan Asin 3. Ebi 4. Cumi Kering 5. Ikan Tipis
Olahan Segar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bandeng Tanpa Duri 2. Kerang Darah Kupas
Pembekuan	Udang Peeled/HL/HO
Surimi dan Turunannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surimi 2. Bakso Ikan 3. Nugget Ikan
Pengasapan	Cakalang Asap
Peragian	Terasi
Ekstraksi	Minuman Segar Rumput Laut
Pengolahan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerupuk Rumput Laut 2. Kerupuk Stick Balado Rumput Laut 3. Kerupuk Kaktus Rumput Laut 4. Kerupuk Kertas Rumput Laut 5. Keripik Tempe Rumput Laut 6. Kerupuk Teri Ambalat Wijen 7. Kerupuk Teri Ambalat Crispy 8. Kerupuk Stick Ikan 9. Kerupuk Udang Bawang 10. Keripik Ikan 11. Es Krim Rumput Laut 12. Kerupuk Ikan Teri 13. Kerupuk Ebi 14. Kue Mentega Rumput Laut 15. Cake Rumput Laut 16. Kue Bangke Rumput Laut 17. Dodol Rumput Laut 18. Kue Bolu Rumput Laut 19. Mie Rumput Laut 20. Manisan Rumput Laut 21. Madu Mongso Rumput Laut 22. Kue Kelapa Rumput Laut 23. Amplang

Sumber : DKP Kab. Nunukan (Diolah)

Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan bahwa jenis-jenis olahan Kabupaten Nunukan cukup berkembang dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari program pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan baik oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (DisperindagKop dan UMKM), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah (BP2KBD), Badan Perbatasan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Organisasi Wanita dan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan utama (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan), beliau menyatakan bahwa :

“Sebenarnya kalau kita lihat sekarang olahan hasil perikanan perkembangannya sudah lumayan bagus, dari sisi kreatifitas para perajin atau pengolah hasil perikanan dan kelautan kita. Namun harus terus dimotivasi, kemudian terus ditingkatkan, baik keragamannya, variasi dari olahan-olahan itu, dan yang paling penting adalah bagaimana olahan-olahan itu sudah menjadi produk yang bisa dijual dimasyarakat dan diterima oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Dan ini harus terus dibimbing, dibina, dan terus harus dimonitor dan bagaimana kita harus membantu dari sisi apanya kira-kira yang masih kurang. Makanya kita harus membuka diri, artinya produk-produk diluar kan semakin berkembang, artinya kita harus bisa bersaing dengan daerah lain. Kalau kita kemasukan produk-produk dari daerah lain yang sebenarnya bisa juga kita buat atau olah sendiri, maka seharusnya kita terapkan ATM (amati, tiru, modifikasi) apa yang sudah berkembang didaerah kita itu dari sisi pasarnya berarti masyarakat senang, kemudian kita amati dan cermati itu dan kita tiru tapi jangan sama persis, artinya kita sesuaikan dengan bahan baku yang ada disekitar kita sehingga kita bisa menjadikan atau menghasilkan produk baru yang betul-betul bisa diterima masyarakat dan menjadi sumber ekonomi baru dari perajinnya.” (Wawancara pukul 14:00, 19 Mei 2016)

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan diatas, beliau juga mengakui bahwa memang produk olahan di Kabupaten Nunukan cukup berkembang dan bervariasi. Hal tersebut patut disyukuri dan dapat dikatakan program bantuan maupun pendampingan dari Pemerintah Daerah kepada pelaku utama pengolah hasil perikanan cukup membantu mereka dalam berkreasi atau lebih meningkatkan kreatifitas mereka dalam menciptakan ragam produk olahan berbahan baku ikan di Kabupaten Nunukan.

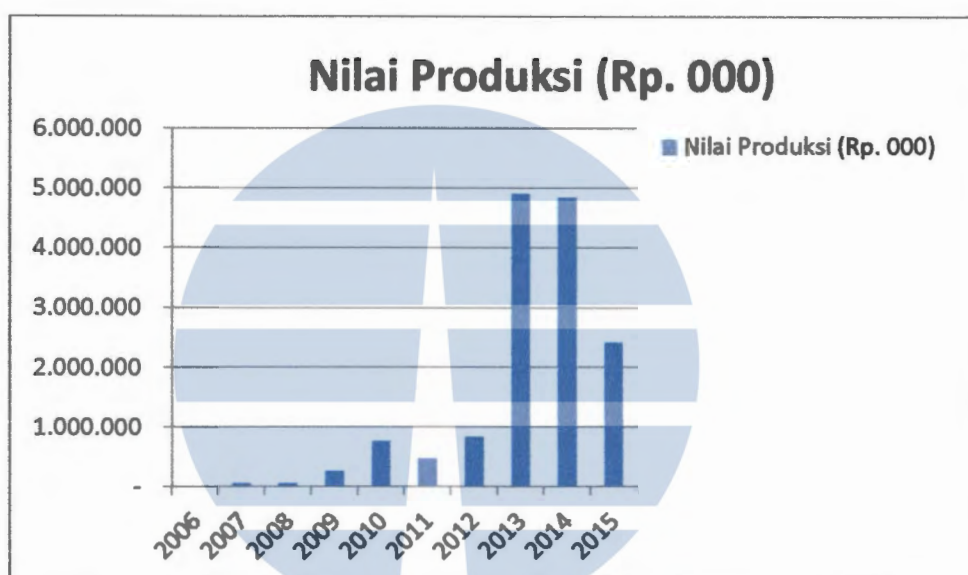
Dengan meningkatnya volume produksi kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan berarti juga meningkatkan pendapatan mereka. Hal tersebut terlihat pada Tabel 4.8 berikut yang menggambarkan nilai produksi kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan.

Tabel 4.8 Nilai Produksi POKLAHSAR Sasaran Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan

No	Nama Kelompok Sasaran Program (Poklahsar)	Nilai Per Tahun (Rp.) dalam 000									
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mina Barokah	-	9.000	4.000	9.200	716.000	90.000	172.800	910.500	712.905	14.280
2.	Kramat Jaya	-	-	700	1.225	-	-	-	-	-	-
3.	Indah Lestari	10.000	12.000	18.000	26.400	22.500	25.000	230.000	27.500	75.000	50.000
4.	UP2K Praja Nusa	-	350	70	1.200	-	140	96	2.800	18.000	17.500
5.	UKM. Cahaya Madinah	-	-	-	-	1.400	3.800	60.000	217.500	980.110	702.000
6.	Alvina	-	37.500	40.500	42.750	24.000	27.750	30.000	353.400	642.300	480.975
7.	Rina Home Cake	-	-	-	-	-	5.440	5.200	64.640	66.248	61.000
8.	Melati Putri	-	-	-	1.600	-	1.500	4.800	234.825	248.100	82.800
9.	Kopwan Arafah	-	-	-	525	-	300	3.750	30.000	37.500	23.700
10.	Melati Indah 1	-	-	-	-	-	80	750	12.500	15.000	33.000
11.	Ika Abadi	-	-	-	-	-	5.250	3.000	2.500	4.000	5.000
12.	Daman Sejahtera	-	-	-	-	-	3.000	3.000	4.000	5.000	6.250
13.	Koperasi Bahtera Delima	-	-	-	180.000	-	297.500	322.315	1.739.210	2.030.235	445.035
14.	Koperasi Mina Harapan Sejahtera	-	-	-	150	-	225	120	240	300	675
15.	Anggrek	-	-	-	-	-	3.000	1.500	-	-	-
16.	Sinar Harapan	-	-	-	-	-	-	-	1.000	4.000	5.000
17.	Hawa Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	500	2.000	2.500
18.	KUBE An-Nur.	-	-	-	-	-	-	-	308.700	406.800	488.430
Total		10.000	58.850	63.270	263.850	763.900	462.985	837.331	4.909.815	4.847.498	2.418.145

Sumber : DKP Kab. Nunukan Tahun 2006 – 2015 (Diolah)

Sama halnya dengan peningkatan produksi, peningkatan nilai produksi juga terlihat dari data pasca program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan yang diimplementasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Untuk melihat fluktuasi nilai produksi dari pra program (antara tahun 2006 – 2007) dan pasca program (antara tahun 2008 – 2015) lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar 4.3 berikut.



Gambar 4.3 Diagram Fluktuasi Nilai Produksi Kelompok Sasaran Program Per Tahun

Pada tabel 4.8 dan gambar 4.3 menggambarkan nilai produksi kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan. Nilai produksi ini merupakan pendapatan bruto (pendapatan kotor) kelompok dari hasil perkalian antara volume produksi dengan harga jual produk. Dari pendapatan bruto tersebut setelah dikurangi dengan biaya produksi baru merupakan keuntungan atau pendapatan netto kelompok. Pada tahun 2006 dan 2007 nilai produksi kelompok pengolahan yang ada pada saat itu berkisar antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai

dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Nilai produksi pada saat itu cukup rendah dikarenakan varian dan volume produksi produk olahan hasil perikanan yang memang masih sedikit. Setelah program diimplementasikan mulai terlihat peningkatan nilai produksi poklhasar yaitu sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Tidak dipungkiri bahwa sektor pengolahan hasil perikanan memberikan nilai tambah yang cukup tinggi bagi kelompok pengolah hasil perikanan di Kabupaten Nunukan.

Sebelum tahun 2008, kelompok pengolahan hasil perikanan hanya ada 4 (empat) kelompok di Kabupaten Nunukan. Pada saat itu orang-orang yang melakukan usaha pengolahan hasil perikanan hanya perorangan. Pembentukan kelompok pengolah hasil perikanan baru difasilitasi oleh pemerintah daerah mulai tahun 2006, dan kelompok-kelompok pengolahan hasil perikanan mulai banyak terbentuk sejak tahun 2009 tepatnya saat program pemerintah dalam bentuk bantuan kepada masyarakat banyak diberikan. Tidak dipungkiri banyak kelompok pengolahan hasil perikanan yang terbentuk awalnya adalah untuk persyaratan menerima bantuan dari pemerintah, akan tetapi seiring berjalannya waktu melalui bimbingan dan pembinaan oleh pemerintah baik itu oleh DKP Kabupaten Nunukan sendiri yang dibantu oleh Penyuluh Perikanan lapangan (PPL) dibawah naungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Daerah (BKP3D) Kabupaten Nunukan serta instansi terkait lainnya, akhirnya kelompok-kelompok tersebut sukses memperluas usaha produksi olahan hasil perikananannya. Pada tabel 4.9 berikut merupakan kelompok-kelompok

pengolah hasil perikanan yang ada di kabupaten Nunukan saat ini (sampai dengan 2016).

Tabel 4.9 Data Pelaku Utama Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan

No.	Pelaku Usaha	Alamat	Produk Olahan
1.	POKLAHSAR Mina Barokah	Jl. Patimura Sei. Sembilan RT. 18 Nunukan Selatan	Bandeng Cabut Duri
2.	POKLAHSAR Indah Lestari	Jl. Pangeran Antasari Kel. Nunukan Timur	Kerupuk Teri Ambalat Wijen, Kerupuk Teri Ambalat Crispy, Abon Bandeng, Abon Ebi Super Pedas, Kue Kelapa Rumput Laut
3.	POKLAHSAR Alvina	Jl Imam Bonjol RT. 06 Kel. Nunukan Timur	Kerupuk Rumput Laut, Kerupuk Udang Bawang, Amplang Ikan Bulan, Kerupuk Stick Rumput Laut, Mie Rumput Laut
4.	KOPWAN Arafah	Jl. Sutanto RT. 08 Kel. Nunukan Tengah	Abon Ikan Tuna, dan Abon Ebi
5.	POKLAHSAR An-Nur	Jembatan Sei Mentri RT. 12 Kel. Nunukan Barat	Kerupuk Stick Rumput Laut, Kerupuk Kaktus Rumput Laut, Kue Bolu Rumput Laut, Mie Rumput Laut, Amplang Bulan
6.	POKLAHSAR UKM. Cahaya Madinah	Jl. Ujang Dewa RT. 01 Kel. Nunukan Selatan	Kerupuk Kertas Rumput Laut Keju, Amplang Bandeng, Dodol Rumput Laut, Manisan Rumput Laut, Madu Mongso Rumput Laut, Es Krim Rumput Laut
7.	POKLAHSAR Melati Putri	RT. 03 Desa Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur	Es Krim Rumput Laut, Kerupuk Ikan Teri, Kerupuk Ebi, Kue Mentega Rumput Laut, Cake Rumput Laut, Kue Bangke Rumput Laut
8.	Koperasi Bahtera Delima	Jembatan Inhutani Ujung Kel. Nunukan Utara	Surimi Tenggiri, Surimi Bulan, Surimi Lamadang, Udang HO, Udang HL, Udang Kupas, Amplang Bulan, Bakso Ikan, Lekor.
9.	POKLAHSAR Rina Home Cake	Jl. Hasanuddin RT. 08 Kel. Nunukan Tengah	Keripik Ikan, Kerupuk Stick Ikan, Abon Ikan Pedas, Bakso Ikan
10.	POKLAHSAR Ifmawati	Jl. H. Junnudi RT. 04 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik	Amplang Teri Ambalat
11.	POKLAHSAR Bina Usaha	RT. 07 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi

Bersambung...

No.	Pelaku Usaha	Alamat	Produk Olahan
12.	POKLAHSAR Cahaya Purnama	RT. 07 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi
13.	POKLAHSAR Binalawan Mandiri	RT. 01 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi
14.	POKLAHSAR Binalawan Makmur	RT. 01 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi
15.	POKLAHSAR Cahaya Purnama	RT. 07 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi
16.	POKLAHSAR Sebatik Sukses	RT. 01 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi
17.	POKLAHSAR Bina Lestari	RT. 07 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat	Ikan Kering Tipis, dan Ebi
18.	POKLAHSAR Blue Sea Lestari	Jl. Bhayangkara RT. 11 Kec. Sei Nyamuk	Kerupuk Ikan Tenggiri, Kerupuk Teri, Lekor Tenggiri, Amplang
19.	POKLAHSAR Nurul Yaqin	Jl. Jenderal Sudirman RT. 01 Desa Sei Manurung Kec. Sebatik	Abon Cakalang, Amplang Tenggiri, Teri Bon, Kerupuk Udang, Kerupuk Teri, Serondeng Udang.
20.	Kelompok Teri Ambalat	Jl. Jenderal Sudirman RT. 04 Desa Sei Manurung Kec. Sebatik	Amplang
21.	IKM Karima	Jl. Ujang Dewa Gg. Limau Kel./Kec. Nunukan Selatan	Keripik Rumput Laut Tempe
22.	IKM Zakina	Jl. Ujang Dewa Kel./Kec. Nunukan Selatan	Cakalang Fufu, Cakfu Rica-rica
23.	IKM Takalar	Jl. Yos Sudarso Kel. Tg. Harapan/Mamolo Kec. Nunukan Selatan	Kerupuk Stick Rumput Laut, Bakso Ikan
24.	IKM Harapan Baru	Jl. Yos Sudarso Kel. Tg. Harapan/Mamolo Kec. Nunukan Selatan	Terasi Udang Rumput Laut Pedas

Sumber: Tesis Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan Oleh DKP Provinsi Kalimantan Utara (Patriani, 2016)

Menurut Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan seperti yang terlihat pada tabel 4.9 bahwa pelaku utama pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan dilakukan oleh orang perorangan dan kelompok. Untuk kelompok terdiri dari Kelompok Pengolah dan Pemasar

(POKLAHSAR) yang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan dan Koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan. Sistem POKLAHSAR dan Koperasi terdiri atas ketua dan anggota. Karena pengolahan masih dalam skala mikro-kecil atau skala rumah tangga, maka pada umumnya tempat produksi dilakukan di rumah ketua kelompok dan dibantu oleh anggota-anggotanya. Modal usaha berasal dari ketua dan anggota dan jumlah keuntungan yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan modal yang dikumpulkan per orang dalam kelompok tersebut. Sejahter ini, kinerja poklahsar dan koperasi di Kabupaten Nunukan sangat aktif, mereka dibekali pelatihan, diberi bantuan berupa alat-alat pengolahan, dan dibantu pemasaran produknya oleh Dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindakop dan UMKM) Kabupaten Nunukan (Patriani, 2016).

Jika melihat perbandingan antara volume produksi, nilai produksi, dan jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang tergabung dalam poklahsar maupun koperasi dapat dikatakan bahwa keberlanjutan usaha disektor pengolahan hasil perikanan utamanya oleh kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan akan terus berkembang dikarenakan sektor ini memberikan nilai tambah lebih bagi pelakunya. Senada dengan hasil wawancara peneliti terhadap informan (kelompok sasaran program) yang menyatakan bahwa :

“Saya akan terus berusaha dibidang ini karena ini merupakan usaha utama saya. Cuma sejak ekonomi lesu sekarang ini memang

produksi saya berkurang. Itu kalau ada pameran saja baru ada laku-laku jualan saya. Tapi karena dari usaha ini kami cari makan ya kami tidak akan berhentilah.” (Wawancara pukul 09:00, 16 Mei 2016)

Motivasi kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan dalam upaya meningkatkan produktifitas kelompoknya cukup tinggi. Dari hasil wawancara peneliti dengan *key informan* (kelompok sasaran program), mereka menyatakan bahwa :

“saya itu setiap ada pelatihankah atau pamerankah yang diadakan Dinas Perikanan atau Disperindagkop selalu saya ajak anggota kelompok saya yang lainnya, supaya mereka juga belajar dan semangat. Kalau tidak ketua yang terus kasih semangat mana mau mereka kerja, banyak alasannya, karena urus keluarga lah, karena sibuklah, jadi saya sebagai ketua ini yang terus produksi, supaya ada kelihatan hasilnya kelompok. Biar sedikit tapi dalam satu minggu tu adalah. Kita sadar juga ekonomi di Nunukan sekarang ini sedang lesu-lesunya, kalau biasanya dulu kita bisa ratusan kilo sekali produksi sekarang paling hanya lima puluh kilo saja sekali produksi. Tapi ini kan memang mata pencarian kami, jadi kalau tidak produksi apa mau dimakan” (Wawancara pukul 09:30, 16 Mei 2016)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi dan nilai produksi kelompok sasaran program mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah diimplementasikannya program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan tersebut. Menurut Winarno (2012) bahwa efektifitas terjadi apabila tercapai hasil yang diinginkan atau tujuan dari program tersebut berhasil dicapai. Karena terjadi peningkatan produksi dan nilai produksi yang berarti pula terjadi peningkatan pendapatan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan setelah program bantuan tersebut diimplementasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, maka berarti program tersebut terbukti efektif. Secara keseluruhan realisasi produksi kelompok sasaran dalam hal ini

kelompok dengan intervensi program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan tidak memenuhi kuota, dalam artian tidak mencapai sasaran. Hal ini terjadi karena sasaran program atau kelompok pengolah hasil perikanan yang menjadi sasaran program bantuan memang jumlahnya sedikit. sementara target produksi yang dibebankan kepada kelompok sasaran program ini cukup tinggi. Jika dikalkulasikan rata-rata target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah untuk setiap pelaku usaha yang merupakan kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan tersebut, masing-masing kelompok dibebankan target sebesar 8,85 ton per tahun. Apabila melihat varian atau ragam olahan pelaku usaha kelompok sasaran program ini yang terdiri dari produk olahan dengan volume yang ringan akan tetapi dengan nilai produksi yang besar maka target produksi yang dibebankan tersebut menjadi sangat berat direalisasikan oleh kelompok sasaran program. Perlu di lakukan evaluasi kembali terhadap target produksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Dalam hal motivasi kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan dalam mengembangkan usahanya perlu terus didampingi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan perlu mengembangkan produk dengan mendayagunakan *local content* dalam artian bahan baku produk yang digunakan banyak terdapat disekitar pelaku usaha sehingga bisa didapatkan dengan harga yang murah, yang pada akhirnya dapat menekan biaya produksi. Di Kabupaten Nunukan, *local content* tersebut

adalah Rumput Laut. Rumput Laut sangat melimpah di Kabupaten Nunukan, yang oleh pelaku utamanya dalam hal ini pembudidaya rumput laut kebanyakan dijual dalam bentuk bahan baku atau *raw material* sehingga nilai tambah yang diperoleh hanya sedikit. Apabila semua pelaku usaha pengolahan di Kabupaten Nunukan Nunukan memaksimalkan *local content* ini, maka tidak menutup kemungkinan target produksi akan tercapai.

2. Efisiensi

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap variabel efisiensi yaitu usaha-usaha kelompok untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui indikator manajerial kelompok serta target produksi, diperoleh hasil bahwa manajerial kelompok hampir 80% kelompok sasaran program tidak berjalan dengan baik. Ketua kelompok paling dominan dalam berproduksi dan ada yang anggota-anggota kelompoknya tidak terlibat sama sekali dalam proses produksi dengan kata lain hanya ketua saja yang aktif sedangkan anggota-anggotanya non aktif. Dari hasil wawancara peneliti dengan *key informan* (kelompok sasaran program), mereka menyatakan bahwa :

“Bagaimana mau saya atur anggota-anggota saya, banyak alasan mereka, padahal dulu waktu bentuk kelompok, didampingi kami sama PPL semuanya setuju mau mengembangkan kelompok dengan masing-masing kami produksi sendiri-sendiri, nanti sekretaris dan bendahara yang atur tabungan kelompok kami, tapi nyatanya saya saja sekarang yang aktif, semua anggota saya urus urusannya masing-masing.” (Wawancara pukul 09:45, 16 Mei 2016)

Dari hasil observasi peneliti terhadap 18 (delapan belas) kelompok sasaran program, hanya 4 (empat) poklamsar yang bagus manajerial kelompoknya yaitu Poklamsar Annur, Poklamsar Alvina, Poklamsar UKM. Cahaya Madinah, dan Poklamsar Melati Putri. Mereka memanfaatkan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibantu oleh Pemerintah Daerah dengan baik dan manfaatnya dirasakan oleh semua anggota kelompok.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap indikator target produksi kelompok diperoleh hasil sesuai kutipan dari *key informan* berikut :

“Ada kami punya target Bu, untuk kerupuk setiap bulan antara 100 – 200 Kg sedangkan Abon Ikan sekali produksi saya sampai 200 kg ikan. Pokoknya dalam satu bulan untuk Abon sekitar 800 Kg. Tapi semenjak dua tahun terakhir ini kurang sudah pendapatan, jadi kurang-kurang juga sudah kami produksi. Kalau biasanya kami dalam satu bulan produksi 200 Kg Kerupuk, paling sekarang 50 – 100 Kg saja, karena lama betul lakunya. Itu saja kalau Ramadhan sama pesanan Hari Raya baru kita produksi banyak. Tetaplah ada target bu, soalnya uang-uang listrik, air, uang sekolah anak-anak, setiap bulan itu berapa, jadi kita harus kali-kalikan lah supaya cukup untuk dipakai keluarga dan ada juga lebih-lebihnya sedikit untuk produksi lagi kembali”. (Wawancara pukul 10:00, 16 Mei 2016)

Efisiensi dalam kaitannya dengan penelitian Dampak Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Pada Kelompok Sasaran di Kabupaten Nunukan ini adalah usaha-usaha kelompok sasaran program bantuan tersebut dalam mencapai hasil yang mereka inginkan, dalam hal sejauhmana upaya kelompok sasaran dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya. Hal ini dapat dilihat dari manajerial kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan tersebut, yang mana

sejalan dengan tujuan Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan yaitu bagaimana kelompok sasaran dapat memenuhi target produksi yang telah ditetapkan. Manajerial kelompok sangat mempengaruhi realisasi produksi. Rata-rata jumlah orang dalam 1 (satu) kelompok sasaran bantuan sarana pengolahan hasil perikanan adalah 10 (sepuluh) orang. Jika dalam kelompok tersebut yang aktif berproduksi hanya ketua kelompok saja maka produksi kelompok yang dihasilkan oleh satu orang tadi terhitung mewakili produksi kelompok. Tapi apabila semua orang didalam kelompok tersebut berproduksi, otomatis produksi kelompok juga akan tinggi. Dari 18 (delapan belas) kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan ini, hanya 4 (empat) kelompok sasaran yang manajerial kelompoknya bagus, dalam artian semua anggota kelompok aktif berproduksi dan menyumbang realisasi produksi yang tinggi. Sementara 14 (empat belas) kelompok lainnya hanya ketua kelompok saja yang berperan aktif atau aktif berproduksi. Tentu saja hal ini mempengaruhi jumlah produksi. Oleh karena itu, selain program bantuan sarana pengolahan, program pendampingan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan maupun pihak-pihak terkait lainnya juga harus diaktifkan dalam kaitannya dengan pemberian motivasi kepada kelompok sasaran program ini secara terus menerus. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah bisa diatasi dengan memanfaatkan instansi atau lembaga-lembaga lainnya yang memiliki dana. Sementara dalam kaitannya dengan program pelatihan kepada masyarakat atau pelaku utama

pengolahan hasil perikanan, dapat memanfaatkan Program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yaitu program pelatihan kepada masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan.

3. Kecukupan

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap variabel kecukupan, yaitu sejauhmana tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Indikator terhadap variabel ini adalah kesesuaian antara target produksi pengolahan hasil perikanan untuk kelompok sasaran dengan realisasi produksi olahan hasil perikanan kelompok sasaran. Hasil wawancara peneliti dengan *key Informan* (Kasi Pengolahan, Pemasaran, dan Kelembagaan DKP Kab. Nunukan) untuk indikator perbandingan antara target produksi kelompok sasaran program dengan realisasi produksi kelompok sasaran, beliau menyatakan bahwa :

“Memang terdapat perbedaan yang cukup jauh antara target produksi Pemerintah Daerah dengan progress kelompok sasaran. Tidak bisa disalahkan juga kelompok sasaran karena memang hanya sedikit kelompok sasaran yang menerima bantuan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Bayangkan, hanya delapan belas kelompok yang rata-rata memiliki anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan yang aktif hanya satu dua orang. Ditargetkan harus berproduksi sampai 55 (lima puluh lima) ton setiap tahun. Baru yang diproduksi ini yang ringan-ringan semua seperti kerupuk, itu berapa aja beratnya, tapi besar nilai produksinya. Jadi memang sangat perlu itu manajerial kelompok, dengan mengaktifkan semua anggota sehingga produksi per 1 (satu) kelompok bisa tinggi dan mencapai target”. Selain itu juga memang perlu dievaluasi kembali target daerah untuk hasil produksi kelompok binaan yang dalam hal ini merupakan kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan ini, apakah seimbang antara jumlah kelompok

sasaran program dengan target yang dibebankan”. (Wawancara pukul 09:00, 17 Mei 2016)

Seperti yang terlihat dalam tabel 4.5 sebelumnya bahwa target produksi kelompok sasaran program rata-rata untuk setiap kelompok sasaran dibebankan sebesar 50 sampai dengan 80 ton per tahun. Sedangkan realisasi produksi kelompok sasaran program hanya sekitar 1 sampai dengan 7 ton per tahun. Sangat kontras sekali perbedaan antara target dan realisasi yang dicapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang mendalam baik terhadap kelompok sasaran program dalam hal ini terhadap manajerial kelompoknya maupun terhadap target Pemerintah Daerah sendiri dalam hal produksi kelompok binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Senada dengan hal ini, berikut hasil wawancara peneliti dengan informan utama (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan) :

“Memang target itu harus kita buat agak tinggi kemudian pencapaiannya dibawahnya, itu merupakan hal biasa. Jadi memang akselerasi atau peningkatan penyerapan program atau *outcome* atau nilai manfaat dari program itu terutama didalam pengolahan itu biasanya bagaimana produk itu bisa laku dipasaran, kadang-kadang tergantung dari si pengrajinnya, ada pengrajin atau pengolah hasil perikanan ini yang memang ulet, gigih, sehingga gagal sekali dia coba lagi, gagal lagi dia coba lagi, sampai kemudian dia berhasil, nah itu pasti ada motivasi yang kuat didalam dirinya. Tapi ada juga yang sudah kita latih, sudah kita kasih bantuan alat bahkan ada kita kasih biaya awal untuk memulai suatu usaha itu kan kadang-kadang, tapi kalau jiwanya memang yang kurang ulet, motivasinya juga kurang, sekali mencoba kemudian belum berhasil terus dia mundur, nah ini yang motivasinya yang harus kita kuatkan, apanya kira-kira yang belum ada dimereka itu terus didekati terus, kalau perlu mereka itu kita ajak ke pengolah lain, kadang-kadang kan ada pengolah yang tidak mau menerima kelemahannya sendiri, jadi kita ajak mereka untuk melihat produk orang yang rasa maupun kemasannya sudah lebih baik supaya timbul motivasi lagi didalam dirinya. Jadi pendampingan kepada pengolah itu memang harus terus kita lakukan”. (Wawancara pukul 14:30, 19 Mei 2016)

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, beliau menyatakan bahwa realisasi produksi memang wajar apabila dibawah target, akan tetapi perlu juga mencari tau penyebab tidak terpenuhinya target tersebut, apakah karena faktor dari motivasi pelakunya atau memang pemasarannya yang tidak maksimal dalam artian produk olahan hasil perikanan pelaku usaha tersebut kurang laku dipasaran.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa target Pemerintah Daerah terlalu tinggi bila dibandingkan dengan hasil produksi kelompok sasaran program. Realisasi produksi kelompok sasaran program hanya mampu mencapai 15% saja dari target yang ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Menurut Winarno (2002) faktor kecukupan terpenuhi apabila tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam hal ini realisasi produksi kelompok sasaran program memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berarti faktor kecukupan tidak terpenuhi dalam artian kebutuhan akan terpenuhinya/tercapainya target produksi oleh pemerintah tidak bisa dipenuhi oleh kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan tersebut. Ada beberapa penyebab tidak tercapainya target produksi kelompok sasaran program ini, yaitu :

- a. Pemasaran produk olahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan masih disekitar lokal area, penyebabnya diantaranya yaitu biaya produksi yang tinggi sehingga mempengaruhi harga jual produk, sementara harga produk sejenis diluar daerah lebih murah sehingga produk lokal kalah

bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah. Selain itu kemasan produk olahan hasil perikanan di Nunukan masih dibawah standar, sementara untuk meningkatkan daya saing produk sehingga tidak kalah dengan produk dari luar, pelaku usaha harus memperhatikan keunggulan kemasan sebagai salah satu daya tarik produk. Kurang maksimalnya pelaku usaha dalam mempromosikan produknya juga menjadi kendala dalam kaitannya dengan pemasaran produk olahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan. Selain karena alasan mahal nya biaya produksi, kemasan yang kurang menarik, serta kurangnya promosi, faktor lainnya yang turut mempengaruhi pemasaran produk olahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan adalah susah nya mengurus surat izin kesehatan atau P-IRT sebagai izin pangan konsumsi tingkat terendah yang harus dimiliki oleh tiap-tiap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. P-IRT ini menjadi syarat mutlak produk jika ingin dipasarkan ke minimarket-minimarket yang ada di Kabupaten Nunukan atau yang akan di pasarkan ke luar daerah. Birokrasi yang berbelit-belit dalam kepengurusan P-IRT sangat membingungkan pelaku usaha. Jika P-IRT ini bisa difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan mudah maka pelaku usaha akan sangat terbantu dalam jangkauan areal pemasaran produknya. Karena kendala pemasaran ini maka pelaku usaha hanya memproduksi olahan sesuai permintaan konsumen lokal. Oleh karena itu, perlu pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk fasilitasi promosi, kemasan produk, serta kemudahan dalam mengurus izin P-IRT.

- b. Target produksi yang dibebankan kepada kelompok sasaran program terlalu tinggi, tidak sesuai dengan jumlah kelompok sasaran, dan volume produk olahan pelaku usaha pun termasuk dalam kategori produk bervolume ringan tapi dengan nilai produksi yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dievaluasi kembali target produksi yang dibebankan kepada pelaku usaha yang menjadi kelompok sasaran bantuan sarana pengolahan hasil perikanan Kabupaten Nunukan tersebut.
- c. Manajerial kelompok pelaku usaha yang tidak berjalan maksimal sehingga hanya menyumbangkan sedikit hasil produksi atas nama kelompok. Jika semua anggota dalam kelompok memiliki produksi masing-masing maka tidak menutup kemungkinan target produksi yang dibebankan kepada mereka tersebut akan tercapai. Oleh karena itu, bimbingan manajerial kelompok serta motivasi usaha perlu terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kelompok sasaran bantuan sarana pengolahan hasil perikanan Kabupaten Nunukan ini.

4. Perataan

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap variabel perataan, yaitu keadilan dalam menentukan sasaran kebijakan publik, dimana indikatornya yaitu perbandingan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan manfaat program dengan jumlah pelaku usaha yang tidak mendapatkan manfaat program, maka dikemukakan hasil sebagaimana terlihat dalam tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Tabel Perbedaan Jumlah Pelaku Usaha Perorangan dengan Kelompok

Tahun	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	
	Perorangan	Kelompok (rata-rata 10 Org/Klp)
2008	80	5
2009	100	9
2010	185	10
2011	274	14
2012	766	14
2013	995	18
2014	1.479	18
2015	500	18

Sumber : DKP Kab. Nunukan (Diolah)

Dari tabel 4.10 diatas, bila dirata-ratakan antara pelaku usaha perorangan dengan pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok dan menjadi sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan dengan perkiraan rata-rata jumlah anggota dalam 1 kelompok sebanyak 10 orang, maka dari 100% jumlah pelaku usaha yang bergerak dibidang pengolahan hasil perikanan, hanya 24% yang menjadi sasaran program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan.

Menurut Winarno (2002) bahwa faktor perataan tercapai apabila terdapat keadilan atau keseimbangan didalam menentukan sasaran kebijakan publik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terjadi keseimbangan atau belum dapat dikatakan adil program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan tersebut karena dari 100% pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan baru 24% yang menjadi sasaran program tersebut. Hal ini terjadi selain karena keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah, juga disebabkan oleh

persyaratan yang ditetapkan didalam petunjuk teknis kegiatan yang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjadi sasaran program. Oleh karena itu perlu pendampingan yang intensif dari Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan persyaratan menjadi calon penerima bantuan/sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan. Keterbatasan anggaran Pemerintah daerah bisa disiasati dengan mengajukan proposal bantuan ke CSR (*Sorporate Social Responsibility*) perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan atau mengajukan proposal ke instansi-instansi terkait dengan permasalahan perikanan seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Perbatasan Daerah/Nasional, dan instansi-instansi terkait lainnya.

5. Responsivitas

Responsifitas yaitu tanggapan kelompok sasaran terhadap program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan yang menguraikan tanggapan-tanggapan positif, kritik, maupun saran-saran atas program yang telah diimplementasikan. Dari hasil wawancara peneliti dengan *key informan* diperoleh hasil sebagaimana kutipan berikut :

“Dengan adanya bantuan ini kami sangat terbantulah Bu, kalau dulu kami hanya bisa produksi paling banyak 50 Kg itupun seharian dikerja, tapi Alhamdulillah sejak kami dibantu Dinas Perikanan biar sampai 200 Kg kami produksi dalam satu hari pun bisa, malah lebih cepat karena peralatn-peralatan yang dibantu itu memang untuk skala produksi besar. Adalah perbedaannya pendapatan kami dari sebelum dibantu itu sama setelah dibantu perikanan. PPL juga membantu kami, kadang kami dikasih pelatihan, didatangi kami setiap bulan untuk didata produksi kami. Mereka juga kadang beli produk kami untuk dijadikan oleh-oleh tamu katanya, jadi semua pihak banyak lah yang bantu kami Bu.

Bank BPD juga banyak bantu kami, mereka beli produk kami yang dibungkus kecil-kecil, mereka biyai stand UMKM waktu pameran, tapi satu tahun kemarin tidak ada sudah Bank BPD bantu kami, mungkin karena mereka ganti pimpinan sudah jadi lain-lain lagi kebijakannya. Cuma kadang ada bantuan itu bu kaya Mixer itu besar sekali daya listriknya. Sudah saya minta tambahan daya ke PLN tapi bilang mereka belum bisa, jadi belum saya pakai lah itu mixer, tunggu ditambah dulu daya listrikku baru lah bisa dipakai itu.” (Wawancara pukul 09:00, 19 Mei 2016)

Pada dasarnya program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena sangat membantu dalam mengefisienkan waktu produksi serta volume produksi yang dihasilkan pun semakin bertambah. Akan tetapi ada beberapa bantuan yang memang tidak bisa dioperasikan karena beberapa kendala, diantaranya kendala daya listrik di unit pengolahan pelaku utama yang tidak memenuhi, kemudian karena faktor ketidaktahuan dalam mengoperasikan alat-alat yang dibantu tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut seharusnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan tidak hanya membantu peralatan sebagai sarana produksinya saja, akan tetapi juga harus didampingi dalam hal pengoperasian alat, teknologi pengolahan untuk menciptakan diversifikasi produk olahan, serta terus memotivasi pelaku utama dalam berkarya menghasilkan produk olahan hasil perikanan yang berkualitas dan laku dipasaran. Senada dengan hasil wawancara peneliti dengan informan utama (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan) sebagai berikut :

“Jadi kita itu harus mensurvei dulu kebutuhan para pelaku usaha pengolahan ini, apa yang mereka butuhkan, itu yang kita bantu. Jadi kalau dulu-dulu itu program bantuannya banyak gagal, ya memang karena itu, tidak direncanakan dengan baik. Pada dasarnya program bantuan ini baik ya, dan akan terus kita lanjutkan, akan tetapi memang perlu sedikit modifikasi, misalnya selain diberikan

bantuan, juga diberi pelatihannya, baik pengoperasian alat maupun *skill* dalam menciptakan produknya, hingga ke pemasaran produknya. Intinya program bantuan yang sudah kita berikan itu perlu dievaluasi kembali agar supaya dalam keberlanjutan program tersebut, akan lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, utamanya kelompok sasaran yang kita bantu.” (Wawancara pukul 14:45, 19 Mei 2016)

Menurut Winarno (2002) responsivitas adalah tanggapan sasaran kebijakan terhadap kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon positif lebih banyak diutarakan oleh *key informan* daripada kritikan. Hanya saja ada beberapa bantuan yang tidak direncanakan dengan matang sebelum direalisasikan, contohnya ada beberapa peralatan yang ternyata membutuhkan daya listrik yang tinggi sedangkan ketersediaan daya listrik di unit pengolahan kelompok sasaran program tidak memenuhi syarat. Selain itu juga dikarenakan faktor kurangnya daya listrik yang tersedia di Kabupaten Nunukan. Untuk bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada kelompok sasaran akan tetapi tidak dimanfaatkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan perlu melakukan pendekatan-pendekatan terhadap kelompok tersebut, apakah bantuan tersebut akan digunakan kembali dengan cara dilatih cara mengoperasikan alat tersebut, atau jika kelompok tidak sanggup untuk menggunakan alat bantuan yang diterima harus diarahkan untuk mengalihkan bantuan tersebut kepada kelompok yang sanggup mengoperasikannya.

6. Ketepatan

Ketepatan yaitu nilai atau harga dari tujuan program. Indikator dari ketepatan dalam penelitian ini adalah ketepatan sasaran program dan kesesuaian dampak program dengan tujuan yang diharapkan.

Sasaran program berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* bahwa menurut mereka sasaran program oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan sudah tepat, seperti hasil kutipan wawancara salah satu *key informan* berikut :

“Perikanan itu membantu memang betul orang-orang yang sudah punya produksi dilihatnya Bu baru kita dibantu, sudah saya lihat sendiri teman-teman pengolah lain itu yang dikasih bantu dari perikanan, semuanya memang sebelumnya sudah bekerja dibidang pengolahan ikan ini, sudah ada produknya kelihatan baru mereka mau bantu. Sepertinya syarat bantuan dari mereka memang begitu Bu. Kalau menurut saya ya sangat tepat sasaran lah, yang tidak tepat itu kalau dia itu pekerja sawah baru dikasih peralatan pengolahan ikan itu baru namanya tidak tepat sasaran. Dan juga mereka melihat dari kemampuan kami bu, kalau dilihatnya orangnya cukup punya modal biasanya tidak dibantu banyak. Tapi adalah tetap dibantu seperti contoh-contoh kemasan kemarin itu, semua kami dikasih.” (Wawancara pukul 10:30, 19 Mei 2016)

Menurut *key informan* (Kasi Pengolahan, Pemasaran Perikanan, dan Kelembagaan DKP Kabupaten Nunukan) bahwa tujuan program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu mengelola sumber daya alam yang banyak tersedia disekitarnya sebagai sumber mata pencaharian mereka. Walaupun realisasi produksi pengolahan hasil perikanan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, akan tetapi terlihat kemajuan yang sangat memuaskan dari segi varian atau diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Nunukan saat ini bila dibandingkan dengan keadaan 10 (sepuluh) tahun

yang lalu. Hanya saja memang perlu pembinaan lebih lanjut terhadap para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan ini utamanya dari segi kualitas dan mutu produk, kemasan produk, kreatifitas promosi, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran produk.

Menurut Winarno (2002), ketepatan adalah nilai atau harga dari tujuan program. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa bantuan sarana pengolahan hasil perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan tepat sasaran. Menurut hampir semua *key informan* menyatakan demikian. Berarti dapat disimpulkan bahwa unsur ketepatan terpenuhi didalam implementasi program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan ini.

Dari hasil pembahasan terhadap kriteria-kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik dalam hal ini yaitu Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, dengan *output* berupa bantuan sarana pengolahan hasil perikanan dapat disimpulkan bahwa program tersebut memberi dampak yang baik terhadap produktifitas kelompok sasaran atau dengan kata lain program tersebut berhasil. Hanya saja ada beberapa faktor penghambat kelompok sasaran dalam memenuhi target produksinya yang harus dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dampak bantuan sarana pengolahan hasil perikanan pada kelompok sasaran dari segi efektivitas program yaitu terjadinya peningkatan produktivitas kelompok sasaran yang terlihat dari peningkatan produksi dan nilai produksi mereka. Dari segi efisiensi program yaitu sejauhmana kelompok sasaran dapat memenuhi target produksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, untuk produksi kelompok sasaran memenuhi target Pemerintah Daerah, sedangkan untuk produksi pengolahan hasil perikanan secara keseluruhan tidak memenuhi target Pemerintah Daerah, dalam artian program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan ini terbukti efisien. Dampak dari segi kecukupan atau kesesuaian antara hasil produksi kelompok sasaran dengan target produksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan hasil yang tidak memuaskan atau dengan kata lain target produksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak mampu dipenuhi oleh kelompok sasaran yang disebabkan oleh faktor : (a). Jumlah sasaran program yang sedikit yang berpengaruh terhadap total produksi; (b). Manajerial kelompok yang tidak berjalan maksimal yang juga mempengaruhi produksi total kelompok; serta (c). Target produksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sangat tinggi. Dari segi perataan atau keadilan dalam menentukan sasaran program

belum terjadi keseimbangan atau program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan belum dapat dikatakan adil karena dari 100% pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan baru 24% yang menjadi sasaran program, oleh karena itu berdampak terhadap pencapaian target produksi kelompok sasaran. Dari segi responsivitas program menunjukkan tanggapan yang positif dari kelompok sasaran karena program terbukti dapat meningkatkan produktivitas mereka. Dari segi ketepatan atau nilai dari tujuan program menunjukkan keberhasilan, dalam artian program tepat sasaran dan dapat memenuhi tujuan program yaitu peningkatan produktivitas pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan

2. Penyebab tidak terealisasinya target produksi kelompok sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
 - a. Jumlah sasaran program hanya sedikit bila dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Nunukan. Jika jumlah sasaran program banyak maka tidak menutup kemungkinan target daerah yang telah ditetapkan akan tercapai.
 - b. Manajerial kelompok yang tidak berjalan maksimal, jika semua yang terlibat didalam kelompok memiliki produk masing-masing, tidak hanya dihandle oleh ketua kelompok saja maka total produksi kelompok akan meningkat. Perlu pendampingan yang intensif dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan dalam

menerapkan manajerial kelompok yang baik bagi sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan tersebut.

- c. Target Pemerintah Daerah yang terlalu tinggi tidak seimbang dengan jumlah sasaran program.
- d. Permasalahan pemasaran merupakan faktor yang menyebabkan produksi olahan hasil perikanan menurun. Kurangnya daya saing produk karena kemasan yang kurang menarik serta harga bahan baku yang cukup tinggi membuat produk lokal Kabupaten Nunukan kalah bersaing dengan produk luar yang lebih menarik dan harganya pun murah.

B. Saran

1. Perlu pendampingan yang intensif oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan kepada kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan terutama yang berkaitan dengan manajerial kelompok, bimbingan kualitas produk, pemasaran yang efektif, penggunaan *local content* dalam rangka menekan biaya produksi, serta kemasan produk yang menarik sehingga produk olahan hasil perikanan Kabupaten Nunukan dapat memiliki daya saing yang tinggi dipasaran.
2. Perlu dievaluasi kembali target produksi kelompok binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan dalam hal ini kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, (2012). Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Tesis Universitas Indonesia
- Astuti, dkk. (2013). Peningkatan Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis *Technology Content* Untuk Mendukung Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. *Jurnal Peningkatan Produktivitas Usaha Kecil & Menengah (UKM)*.
- Bintarto, (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dun, William, 2000. Analisis Kebijakan Publik Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Habibillah, Ahmad Darma. (2010). *Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal (DPM APBN TA. 2006) melalui Mekanisme Pinjaman bagi Pembudidaya Ikan Skala Kecil di Kota Metro*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hamidun, (2007). Produktivitas Kerja. Diakses 15 Juni 2016, dari website <https://hamidun.wordpress.com/2007/11/27/produktivitas-kerja-2/>
- Irul, (2014). Beberapa Konsep Tentang Kesejahteraan. Diakses tanggal 20 Juni 2016, dari Website <http://gusirul.blogspot.co.id/2014/01/beberapa-konsep-tentang-kesejahteraan.html>
- Maryono, (2013). Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Pertanian di Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2013. Tesis Universitas Terbuka. Jakarta
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Third Edition. Sage Publications, Inc
- Nikijuluw V. P. H. (2007). *Meningkatkan nilai tambah perikanan*. Jakarta: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Patriani, (2016) *Strategis dan Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Di Kabupaten Nunukan*.

- Reski, (2013), Dampak Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan Tahun 2012 . Tesis Universitas Terbuka. Jakarta
- Santosa, Hidayat, dan Indroyono. (2003). *Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Propinsi D.I. Jogjakarta*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vo. 18, No. 2 Hal. 144 – 160. Univeritas Gadjah Mada. Yogyakarta. <http://jieb.feb.ugm.ac.id/catalog/index.php/jieb/article/view/605>
- Sinungan, M. (2005). *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Jakarta. Bumi Aksara
- Soekartawi. (2002). *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada
- Soeprapto. 2000. *Evaluasi Kebijakan*. Rinike Cipta Jakarta
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media, Jogjakarta
- Suryahadi, Asep. (2007). *Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*. Modul 4 : Persyaratan dan Unsur-unsur Evaluasi yang Baik. Bappenas. Jakarta. www.ditpk.bappenas.go.id
- Syukri M. (2011). *Analisis strategi pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) Pemerintah Kota Tanjung Pinang*. Jakarta: Tugas Akhir Program Magister. Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
- Wibawa, Samodro, dkk 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Study Kasus: Yogyakarta : Center of Academic Publishig Service (CAPS)*
- Renstra, dan Peraturan-peraturan**
- Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, (2010), *Pedoman Pengelolaan Dana Bansos TA. 2010*, Jakarta

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

Perencanaan Strategis (Renstra) Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2012 – 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial



Lampiran 1:

PEDOMAN OBSERVASI			
No.	Hal yang diamati		Tanggal Observasi
	Variabel	Indikator	
1.	Efektivitas	a. Produktivitas kelompok sasaran (produksi, pendapatan, keberlanjutan usaha) b. Motivasi kelompok sasaran	16 Mei 2016
2.	Efisiensi	a. Manajerial Kelompok Sasaran b. Target Pencapaian Produksi Kelompok Sasaran.	16 Mei 2016
3.	Kecukupan	Kesesuaian antara target produksi dan realisasi produksi kelompok sasaran	17 Mei 2016
4.	Perataan	Perbandingan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan manfaat program dengan jumlah pelaku usaha yang tidak mendapatkan manfaat program.	18 Mei 2016
5.	Responsivitas	Tanggapan kelompok sasaran terhadap program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan (tanggapan positif, kritik, dan saran)	19 Mei 2016
6.	Ketepatan	a. Perubahan-perubahan yang dialami kelompok sasaran (produktivitas) b. Ketepatan sasaran program c. Kesesuaian dampak program dengan tujuan yang diharapkan	19 Mei 2016

Lampiran 2:

PEDOMAN WAWANCARA	
A. IDENTITAS RESPONDEN	
1. Nama	: Patriani, S.Pi
2. Pekerjaan/Jabatan	: PNS / Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran Perikanan dan Kelembagaan
3. Instansi/Lembaga	: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
B. DAFTAR PERTANYAAN	
4.	Program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah sejak tahun berapa?
5.	Ada berapa jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan? Dari jumlah tersebut, ada berapa pelaku usaha yang menjadi sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan dari DKP Kabupaten Nunukan sejak diimplementasikannya program tersebut?
6.	Bagaimana kriteria-kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjadi sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan?
7.	Bagaimana mekanisme program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan ini sejak tahap awal hingga tersalurkanya bantuan kepada sasaran program?
8.	Apa indikator keberhasilan program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan ini?
9.	Apa tujuan yang diharapkan dari Pemerintah Daerah terhadap program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan ini?
10.	Bagaimana realisasi produksi kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan secara kolektif? Apakah sesuai dengan target daerah?
11.	Apakah dari DKP Kabupaten Nunukan pernah melakukan evaluasi dampak program secara independent?

PEDOMAN WAWANCARA

Responden Kelompok Sasaran Program Bantuan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Nunukan

A. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah usaha pengolahan hasil perikanan yang dijalani merupakan usaha utama/sumber penghasilan utama atau sampingan?
2. Apakah usaha yang dijalani ini dilakukan sebelum mendapatkan program bantuan dari Pemerintah atau setelah program?
3. Apa saja jenis-jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah khususnya DKP Kabupaten Nunukan?
4. Bagaimana unsur manfaat bantuan Pemerintah tersebut bagi kelompok Bapak/Ibu?
5. Apa saja jenis-jenis produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan?
6. Berapa rata-rata produksi perbulan?
7. Bagaimana produksi dan pendapatan Bapak/Ibu pra dan pasca program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan dari DKP Kabupaten Nunukan?
8. Bagaimana motivasi Bapak/Ibu untuk kelanjutan usaha dibidang pengolahan hasil perikanan ini? Apakah pernah memikirkan untuk perluasan produksi, apa saja cara-cara yang akan/ingin ditempuh dalam rangka perluasan produksi?
9. Apakah Bapak/Ibu mempunyai strategi khusus untuk mengelola bantuan yang telah diberikan oleh DKP Kab. Nunukan ini agar bermanfaat untuk semua anggota kelompok? Misalnya, jumlah bantuan yang semula diberikan oleh DKP 1 (satu) unit kemudian oleh kelompok ditargetkan menjadi 2 (dua) unit ditahun berikutnya melalui mekanisme tabungan kelompok atau mekanisme lainnya versi Bapak/Ibu?
10. Apakah Bapak/Ibu mempunyai target produksi perbulan atau per tahun? Bagaimana cara Bapak/Ibu memenuhi target tersebut?
11. Apakah ada syarat-syarat khusus yang harus Bapak/Ibu penuhi untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Nunukan ini?

12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dengan menjadi penerima bantuan dari DKP Kabupaten Nunukan ada konsekuensi khusus yang harus ibu penuhi? Apa sajakah konsekuensi tersebut? Misalnya dalam bentuk laporan produksi dan pendapatan, atau target-target produksi yang harus kelompok penuhi, atau apa saja, sebutkan?
13. Semenjak mendapatkan bantuan sarana pengolahan hasil perikanan ini, apakah Bapak/Ibu didampingi oleh DKP Kabupaten Nunukan, misalnya dalam bentuk pembinaan produksi, kemasan, pemasaran, dan lain sebagainya? Apa jabatan khusus pendamping dari DKP Kabupaten Nunukan tersebut?
14. Apakah Bapak/Ibu cukup terbantu dengan pendampingan dari DKP Kabupaten Nunukan tersebut?
15. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang bantuan sarana pengolahan hasil perikanan yang diterima? Apakah sesuai dengan keinginan kelompok? Atau ada permasalahan yang timbul sejak bantuan tersebut diterima, misalnya bantuan tidak bisa digunakan karena rusak atau membutuhkan daya listrik yang tinggi, atau ada alasan-alasan lainnya, kemukakan.
16. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang mekanisme penyaluran bantuan oleh DKP Kabupaten Nunukan kepada pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, apakah Bapak/Ibu merasa diuntungkan atau bahkan dirugikan? Dalam hal apa, sebutkan.
17. Apa saja saran maupun kritik dari Bapak/Ibu tentang program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan tersebut, baik tentang kondisi prasarana dan sarana yang dibantu, syarat menerima bantuan, pendampingan oleh DKP yang diharapkan, maupun kinerja bidang pengolahan hasil perikanan yang diharapkan oleh kelompok.
18. Apa saja permasalahan yang dihadapi Bapak/Ibu dalam mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan?
19. Apa harapan Bapak/Ibu kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka memecahkan persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan?

PEDOMAN WAWANCARA**A. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama : Ir. H. Dian Kusumanto, M.Si
2. Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kepala Dinas
3. Instansi/Lembaga : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

B. DAFTAR PERTANYAAN

4. Jika secara kasat mata melihat perkembangan olahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan, bagaimana tanggapan Bapak?
5. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dibidang perikanan khususnya pengolah hasil perikanan, program-program apa saja yang sudah diimplementasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan?
6. Melihat realisasi produksi kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan yang lebih rendah dari target Pemerintah Daerah, apa tanggapan Bapak? dan apa solusinya menurut Bapak?
7. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan sebelumnya yaitu Kasi Pengolahan, Pemasaran Perikanan, dan Kelambagaan selaku key informan dalam penelitian ini bahwa program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan telah diberikan kepada masyarakat sejak tahun 2008 hingga 2013 baik melalui anggaran APBD maupun APBN, dengan melihat progres produksi kelompok sasaran program yang tidak memenuhi target yang diharapkan, apakah menurut Bapak program ini tidak berhasil?bagaimana dengan kelanjutan program ini?Apakah masih akan diteruskan untuk tahun-tahun berikutnya atau perlu strategi baru/program baru untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan ini?
8. Dari hasil observasi peneliti terhadap kelompok sasaran program bantuan sarana pengolahan hasil perikanan, ada beberapa kelompok yang tidak aktif lagi sedangkan prasarana dan sarana bantuannya masih menjadi inventaris kelompok tersebut, bagaimana kebijakan Bapak dengan hal ini mengingat bantuan tersebut masuk dalam kategori bantuan hibah atau

bantuan yang diserahkan langsung kepada masyarakat? Apakah tidak lebih baik jika sarana dan prasarana tersebut digunakan oleh kelompok-kelompok yang memang punya motivasi untuk berusaha?

9. Menurut Bapak selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, apa yang harus dilakukan untuk memajukan sektor pengolahan hasil perikanan? Apa strategi-strateginya menurut Bapak sendiri? Dan bagaimana peluang sektor ini untuk kedepannya?
10. Apa harapan Bapak baik selaku Kepala Dinas maupun selaku masyarakat yang tinggal di Kabupaten Nunukan akan sektor Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Nunukan?

